

LAPORAN PENELITIAN



DAMPAK PERBEDAAN SIKLUS RPJMD DAN RPJMN PADA PERENCANAAN DAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

OLEH

**PROF. DR. IR. MAHLUDIN H. BARUWADI, MP
DR. SUKARMAN KAMULI, MSI
FITRI HADI YULIA AKIB, SE., ME**

**Dibiayai dengan Dana Proyek Penelitian
Hibah Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)
Berdasarkan SK Rektor Universitas Negeri Gorontalo
Nomor: 1609/UN47/2012Tahun 2012**

**PUSAT KAJIAN PERTANIAN TROPIS
LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOVEMBER, 2012**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

1. Judul Penelitian : Dampak Perbedaan Siklus RPJMD dan RPJMN pada Perencanaan dan Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo
 2. Nama Ketua Peneliti : **Prof. Dr. Ir. Mahludin H. Baruwadi, MP**
 3. NIP : 19650711 199103 1 003
 4. Fakultas : Ilmu-Ilmu Pertanian
 5. Pusat Penelitian : Pusat Kajian Pertanian Tropis
 6. Lembaga Penelitian : Lembaga Penelitian Universitas Negeri Gorontalo
 7. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Gorontalo
 8. Alamat : Jln. Jend. Soedirman No. 6 Gorontalo
 9. No. Telepon/Fax : 0435-821125/0435-821752
 10. E-mail : mahagricdi@yahoo.com
 11. Waktu Penelitian : 4 Bulan
 12. Pembiayaan : Rp. 35.000.000,00
-

Mengetahui,
Kepala Pusat Kajian Pertanian Tropis

Gorontalo, November 2012
Ketua Peneliti

Prof.Dr.Ir. Mahludin Baruwadi,MP
NIP : 196507111991031003

Prof.Dr.Ir. Mahludin Baruwadi,MP
NIP : 196507111991031003

Mengetahui,
Ketua Lembaga Penelitian

Dr. Fitryane Lihawa, MSi
NIP : 19691209 199303 2001

ABSTRAK

Siklus perencanaan pembangunan sering tidak bersamaan antara pemerintah daerah dan pusat. Keadaan ini terjadi pada banyak daerah baik provinsi, maupun kabupaten/kota. Hal ini berlaku juga di Provinsi Gorontalo dimana siklus RPJMD berbeda dengan siklus RPJMN. Penelitian ini bertujuan: 1) mengkaji relevansi RPJMD Provinsi Gorontalo siklus 2007-2012 dan 2012-2017 dengan RPJMN 2010-2014; 2) menganalisis keterkaitan RPJMD 2007-2012 dengan RPJMD 2012-2017 Provinsi Gorontalo; 3) mengkaji relevansi arah, kebijakan dan strategi pembangunan RPJMD 2012-2017 dengan RPJPD 2009-2025 Provinsi Gorontalo; 4) mengkaji relevansi RPJMD Provinsi Gorontalo dengan Koridor Ekonomi Sulawesi berdasarkan MP3EI 2011-2025; dan 5) menganalisis kinerja pembangunan daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan efektivitas pelaksanaan prioritas pembangunan RPJMN 2010-2014.

Metode penelitian ini adalah survei berdasarkan data primer dan data sekunder dengan waktu penelitian selama 4 bulan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumen dan pengamatan langsung. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis statistika deskriptif yaitu berupa penyediaan data dengan menggunakan tabel.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) RPJMD Provinsi Gorontalo 2007-2012 tidak secara spesifik menyebutkan tentang prioritas pembangunan sebagaimana yang dijabarkan dalam RPJMN 2010-2014, meskipun demikian implementasi prioritas nasional terjabarkan dalam agenda utama, program kerja SKPD dan program kerja lintas SKPD, sedangkan RPJMD Provinsi Gorontalo 2012-2017 memiliki relevansi yang lebih nyata dengan RPJMN, dimana prioritas program nasional terjabarkan dalam tujuan pembangunan lima tahun ke depan; 2) Secara tersirat visi dan misi RPJMD 2007-2012 dan RPJMD 2012-2017 memiliki relevansi karena keduanya bermakna peningkatan kemakmuran masyarakat Provinsi Gorontalo sebagaimana visi pembangunan nasional; 3) Relevansi antara arah pembangunan yang terdapat dalam RPJPD 2009-2025 dengan arah kebijakan dalam RPJMD 2012-2017 adalah arah pembangunan dalam RPJMD, pelaksanaannya harus mengacu pada arah pembangunan dalam RPJPD; 4) RPJMD Provinsi Gorontalo telah memuat dan memperhatikan Koridor Ekonomi Sulawesi sebagaimana yang telah disebut dalam MP3EI 2011-2025; dan 5) Pada umumnya indikator prioritas nasional di Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan, sehingga Kinerja pembangunan daerah Provinsi Gorontalo adalah baik.

.....

Kata kunci : Relevansi, Perencanaan, Kinerja, efektivitas

ABSTRACT

Planning cycle often does not coincide between local and central government. This situation occurs in many areas of both provincial and district / city. This applies also in Gorontalo province where different RPJMD cycle RPJMN cycle. This study aims to: 1) assess the relevance RPJMD Gorontalo Province 2007-2012 and 2012-2017 cycles with RPJMN 2010-2014, 2) analyze the relation-year plan 2007-2012 to 2012-2017 RPJMD Gorontalo province, and 3) assess the relevance of the direction, policies and strategies development RPJMD 2012-2017 with 2009-2025 RPJPD Gorontalo Province; 4) assess the relevance RPJMD Gorontalo Province by Sulawesi Economic Corridor by MP3EI 2011-2025, and 5) to analyze the performance of regional development Gorontalo Province by the effectiveness of the development priorities RPJMN 2010-2014.

This research method is a survey based on primary data and secondary data research time for 4 months. Data collection techniques using interview techniques, documents and direct observation. Data were analyzed by descriptive qualitative and quantitative deskriptif using descriptive statistical analysis in the form of penyediaan data using tables. The results showed: 1) year plan 2007-2012 Gorontalo province did not specifically mention the development priorities as outlined in RPJMN 2010-2014, though implementations span the 'hierarchy of national priorities in the agenda, work program and work programs SKPD and across SKPD, while the province RPJMD 2012-2017 Gorontalo has a real relevance RPJMN, which span the 'hierarchy of national program priorities in the development goals the next five years, 2) implicitly vision and mission RPJMD year plan 2007-2012 and 2012-2017 have significantly increased relevance because both provincial public welfare Gorontalo's vision of national development; 3) The relevance of the direction of development contained in RPJPD 2009-2025 with 2012-2017 RPJMD policy direction is the direction of development in the year plan, its implementation should be based on the direction of development in RPJPD; 4) RPJMD Gorontalo province have loaded and Sulawesi Economic Corridor attention as has been mentioned in MP3EI 2011-2025, and 5) In general indicator of national priorities in Gorontalo province has increased, so that the performance of Gorontalo Province development is good.

.....
Keywords: Relevance, Planning, Performance, and effectiveness

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dipanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Penelitian Hibah Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPTN) ini.

Siklus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tidak sama dengan siklus pembangunan 5 tahun Provinsi Gorontalo. Siklus RPJMN 2010-2014, berada pada siklus RPJMD Provinsi Gorontalo pada 2 periode, yaitu: 2007-2012 dan 2012-2017. Dampak Perbedaan siklus ini diungkap dalam penelitian ini

Penyelesaian laporan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik dalam proses administrasi maupun pengumpulan datanya. Penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional yang telah mendanai kegiatan penelitian ini melalui Program Hibah BOPTN 2012. Ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada Rektor Universitas Negeri Gorontalo dan Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Gorontalo yang telah memfasilitasi pelaksanaan penelitian ini mulai dari pengajuan proposal sampai dengan penulisan laporannya. Terima kasih pula penulis sampaikan kepada terima kasih pada pada berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan penelitian ini.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Gorontalo.

Gorontalo, Nopember 2012

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DARTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Tujuan Penelitian	2
1.3 Manfaat Penelitian	3
1.4 Urgensi Penelitian.....	3
BAB II PENDEKATAN TEORETIK.....	4
2.1 Tinjauan Teori.....	4
2.2 Luaran Penelitian	9
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	9
3.1 Obyek Penelitian.....	9
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	10
3.3 Jenis dan Sumber Data	11
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	11
3.5 Metode Analisis Data	11
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	13
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	14
4.2 Relevansi RPJMD Provinsi Gorontalo siklus 2007-2012 dan 2012-1017 dengan RPJMN 2010-2014.....	19
4.3 Relevansi RPJMD 2007-2012 dengan RPJMD 2012-2017 Provinsi Gorontalo	45

4.4 Relevansi Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan RPJMD 2012-2017 dengan RPJPD 2007-2025 Provinsi Gorontalo	46
4.5 Relevansi RPJMD 2012-2017 Provinsi Gorontalo dengan MP3EI 2011-2025.....	61
4.6 Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Berdasarkan Efektivitas Pelaksanaan Prioritas RPJMN 2010-2014.....	65
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	100
5.1 Kesimpulan	100
5.2 Saran	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
3.1	Ringkasan Tujuan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data dan Output Penelitian	13
4.1	Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo, 2006-2010	15
4.2	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Gorontalo	15
4.3	Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama Provinsi Gorontalo	16
4.4	Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha tahun 2008 – 2010	17
4.5	Relevansi Prioritas dan Program Aksi dalam RPJMN 2010-2014 dengan RPJMD Provinsi Gorontalo 2007-2012	27
4.6	Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Gorontalo 2012-2017	55
4.7	Capaian Indikator Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	66
4.8	Capaian Indikator Pendidikan Tahun 2009-2011	70
4.9	Capaian Indikator Kesehatan Tahun 2009-2011	74
4.10	Capaian Indikator Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2009-2011	76
4.11	Capaian Indikator Ketahanan Pangan 2009-2011	78
4.12	Capaian Indikator Infrastruktur Tahun 2009-2011	81
4.13	Capaian Indikator Iklim Investasi dan Iklim Usaha Tahun 2009-2011	83
4.14	Capaian Indikator Energi Tahun 2009-2011	84
4.15	Capaian Indikator Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Tahun 2009-2011	86
4.16	Capaian Indikator Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar	89

	dan Pasca Konflik Tahun 2009-2011	
4.17	Capaian Indikator Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi Tahun 2009-2011	90
4.18	Capaian Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2009-2011	93
4.19	Capaian Indikator Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2009-2011	96
4.20	Capaian Indikator Perekonomian Tahun 2009-2011	97

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
4.1	Tema Pembangunan Koridor Ekonomi dalam MP3EI	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, pada hakekatnya pembangunan daerah adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mewujudkan masa depan daerah yang lebih baik dan kesejahteraan bagi semua masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 32 tahun 2004 yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan secara luas untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan di daerah masing-masing.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, pada pasal 54 disebutkan antara lain, bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hal ini dimaksudkan bahwa perlu penyesuaian pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional.

Sejak tahun 2010 telah ditetapkan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010–2014. Siklus RPJMN tidak sama dengan siklus pembangunan 5 tahun Provinsi Gorontalo. Siklus RPJMN 2010-2014, berada pada siklus RPJMD Provinsi Gorontalo pada 2 periode, yaitu: 2007-2012 dan 2012-2017. Perbedaan siklus ini menyebabkan prioritas-prioritas dalam RPJMD tidak selalu mengacu pada prioritas-prioritas RPJMN 2010-2014.

RPJMN 2010-2014 memiliki 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya, yaitu: 1). Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; 2). Pendidikan; 3). Kesehatan; 4). Penanggulangan Kemiskinan; 5). Ketahanan Pangan; 6). Infrastruktur; 7). Iklim Investasi dan Iklim Usaha; 8). Energi; 9). Lingkungan Hidup dan

Pengelolaan Bencana; 10). Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik; dan 11). Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi. Selain itu RPJMN memiliki 3 prioritas lainnya, yaitu: 1). Kesejahteraan Rakyat; 2). Politik, Hukum, dan Keamanan; dan 3). Perekonomian.

Perbedaan siklus perencanaan di atas menimbulkan berbagai pertanyaan yaitu: bagaimana relevansi RPJMD provinsi dengan RPJMN; bagaimana keterkaitan RPJMD Provinsi Gorontalo siklus 2012-2017 dengan RPJMD sebelumnya; apakah RPJMD 2012-2017 mengakomodir arah, kebijakan dan strategi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2009-2025; apakah RPJMD saat ini memperhatikan koridor ekonomi Sulawesi sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas dan pertambangan nasional sebagaimana tertuang dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025; serta bagaimana pencapaian kinerja pembangunan daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan prioritas pembangunan nasional.

Untuk menjawab permasalahan di atas maka dilakukan penelitian dengan judul: "Dampak Perbedaan Siklus RPJMD dan RPJMN pada Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo".

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengkaji relevansi RPJMD Provinsi Gorontalo siklus 2007-2012 dan 2012-2017 dengan RPJMN 2010-2014.
2. Menganalisis keterkaitan RPJMD 2007-2012 dengan RPJMD 2012-2017 Provinsi Gorontalo.
3. Mengkaji relevansi arah, kebijakan dan strategi pembangunan RPJMD 2012-2017 dengan RPJPD 2009-2025 Provinsi Gorontalo.
4. Mengkaji relevansi RPJMD Provinsi Gorontalo dengan Koridor Ekonomi Sulawesi berdasarkan MP3EI 2011-2025
5. Menganalisis kinerja pembangunan daerah berdasarkan efektivitas pelaksanaan prioritas pembangunan RPJMN 2010-2014.

1.3 Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi ilmiah pada pemerintah Provinsi Gorontalo sehingga dapat dijadikan masukan dalam menyelaraskan target pembangunan daerah dengan pembangunan nasional.

1.4 Urgensi Penelitian

Siklus perencanaan pembangunan sering tidak bersamaan antara pemerintah daerah dan pusat. Keadaan ini terjadi pada banyak daerah baik provinsi, maupun kabupaten/kota. Hal ini berlaku juga di Provinsi Gorontalo dimana siklus RPJMD berbeda dengan siklus RPJMN. Hal ini sudah umum diketahui oleh berbagai pihak di provinsi ini, baik eksekutif, legislatif maupun akademisi. Semua berpendapat bahwa perbedaan ini akan mempengaruhi keselarasan perencanaan antara provinsi dan nasional serta kinerja pembangunan di daerah ini. Akan tetapi masih kurang atau bahkan belum ada penelitian yang mengulas secara rinci dan ilmiah tentang dampak perbedaan siklus perencanaan ini. Oleh karena penelitian ini sangat penting dan mendesak untuk dilakukan agar Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dapat beroleh masukan yang ilmiah sebagai dasar dalam penetapan berbagai kebijakan perencanaan dan pembangunan di provinsi ini.

BAB II

PENDEKATAN TEORITIK

2.1 Tinjauan Teori

Permendagri No. 54 tahun 2010 menyebutkan bahwa pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Sehubungan dengan perencanaan disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah diantaranya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam kurun waktu 5 tahun.

Permendagri No. 10 tahun 2010, pasal 3 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah menggunakan 4 prinsip yaitu: 1) merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; 2) dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; 3) mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan 4) dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Menurut Bappenas (2010) dalam perencanaan pembangunan diperlukan evaluasi secara sistematis dan komprehensif sehingga dapat mengidentifikasi sampai sejauh mana tingkat pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan nasional terhadap target-target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan kinerja pembangunan nasional harus didukung oleh kinerja pembangunan daerah.

Kinerja atau *performance* diartikan oleh para cendekiawan sebagai "penampilan", "unjuk kerja", atau "prestasi". Istilah ini dalam Kamus Illustrated Oxford Dictionary (1998: 606) menunjukkan pada pelaksanaan atau pencapaian dari suatu tugas (*the execution or fulfilment of a duty*) atau pencapaian hasil dari seseorang ketika diuji, dsb (*a person's achievement under test conditions etc*).

Dalam praktek, pengukuran kinerja seringkali dikembangkan secara ekstensif, intensif dan eksternal (Pollit dan Boukaert, 2000: 87). Pengembangan kinerja secara ekstensif mengandung maksud bahwa lebih banyak bidang kerja diikutsertakan dalam pengukuran kinerja; pengembangan kinerja secara intensif dimaksudkan bahwa lebih banyak fungsi-fungsi manajemen yang diikutkan dalam pengukuran kinerja; sedangkan pengembangan secara eksternal diartikan lebih banyak pihak luar yang diperhitungkan dalam pengukuran kinerja. Pemikiran seperti ini sangat membantu untuk lebih secara valid dan obyektif melakukan penilaian kinerja karena lebih banyak parameter yang dipakai dalam pengukuran dan lebih banyak pihak yang terlibat dalam penilaian.

Bernardin dan Russel, 1993: 379 mengartikan kinerja sebagai: "...*the record of outcomes producted on a specified job function or activity during a specified time period...*". Dalam definisi ini, aspek yang ditekankan adalah catatan tentang *outcome* atau hasil akhir yang diperoleh setelah suatu pekerjaan atau aktivitas dijalankan selama kurun waktu tertentu. Dengan demikian, kinerja hanya mengacu pada serangkaian hasil yang diperoleh seseorang selama periode tertentu dan tidak termasuk karakteristik pribadi yang dinilai. Artinya individu dan perilakunya tidak terlibat atau dipandang cukup signifikan berpengaruh terhadap hasil pekerjaan.

Lain halnya dengan Swanson, 1999 (*dalam*, Keban: 2004) yang membagi kinerja atas tiga tingkatan, yaitu kinerja organisasi, kinerja proses dan kinerja individu. Kinerja organisasi mempertanyakan apakah tujuan atau misi suatu organisasi telah sesuai dengan kenyataan (struktur organisasi, kepemimpinan, sosial budaya, sumber daya, dll). Kinerja proses menggambarkan apakah suatu

proses yang dirancang dalam organisasi memungkinkan organisasi tersebut mencapai misinya dan tujuan para individu, didesain sebagai suatu sistem, kemampuan untuk menghasilkan baik secara kuantitas, kualitas dan tepat waktu, memberikan informasi dan faktor-faktor manusia yang dibutuhkan untuk memelihara sistem tersebut, dan apakah proses pengembangan keahlian telah sesuai dengan tuntutan yang ada. Kinerja individu mempersoalkan apakah tujuan atau misi individu sesuai dengan misi organisasi, apakah individu menghadapi hambatan dalam bekerja dan mencapai hasil, apakah individu memiliki kemampuan mental, fisik dan emosi dalam bekerja, dan apakah mereka memiliki motivasi tinggi, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam bekerja.

Chandler & Plano, 1988 (*dalam*, Keban 2004: 195) mengemukakan bahwa pengukuran kinerja *....an evaluation of an employee's or lack progress measured in terms of job effectiveness....*". Batasan tersebut menekankan pada evaluasi kemajuan atau kegagalan dari seorang pegawai. Bernardin & Russel (1993: 380) mendefinisikan penilaian kinerja sebagai *"...a way of measuring the contributions of individuals to their organization..."*. Maknanya adalah mengukur kontribusi yang diberikan oleh setiap individu bagi organisasi.

Untuk mengetahui suatu organisasi memiliki kinerja baik dan atau buruk dapat diketahui melalui penilaian atau suatu penelitian. Penilaian atau penelitian itu penting dilakukan untuk mengetahui sejauhmana organisasi tersebut berhasil mencapai tujuannya dalam jangka waktu atau periode tertentu. Berbagai pendapat yang mendefinisikan tentang kinerja organisasi, antara lain Jackson and Morgan (1978) mengemukakan kinerja pada umumnya menunjukkan tingkat tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Peter Jennergen (*dalam* Steers, 1985) pengertian kinerja organisasi adalah tingkat yang menunjukkan seberapa jauh pelaksanaan tugas dapat dijalankan secara aktual dan misi organisasi tercapai. Dari beberapa konsep tersebut dapat dipahami bahwa kinerja adalah konsep utama organisasi yang menunjukkan seberapa jauh tingkat kemampuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dalam rangka pencapaian tujuan.

Dalam melakukan penilaian kinerja diperlukan indikator-indikator atau kriteria tertentu untuk mengukurnya. Dalam organisasi publik masih sulit untuk ditemukan alat ukur kinerja yang sesuai (Fynn, 1986; Jackson dan Palmer, 1992, dalam Bryson, 1995). Lenvile dkk (1990) dalam Dwiyanto (1995: 7), mengemukakan tiga konsep yang dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu (1) *responsiveness*, (2) *responsibility*, dan (3) *accountability*. Responsivitas (*responsiveness*) adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sedangkan tanggungjawab (*responsibility*) yakni menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi baik yang implisit maupun eksplisit. Sementara akuntabilitas publik (*accountability*) menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat (*elected officials*).

Dari berbagai argumentasi tentang kinerja dan kriteria yang digunakan untuk mengukurnya, maka dalam penelitian ini kinerja diorientasikan pada konsep efektivitas untuk mengukur kinerja pemerintahan daerah. Efektivitas dalam konteks perilaku organisasi merupakan hubungan optimal antara produksi, kualitas, efisien, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan (Gibson, 1996: 28). Efektivitas dapat diartikan sebagai tercapainya tujuan yang berhasil guna dan berdaya guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas dalam konteks ini adalah menyangkut apakah arah, strategi, kebijakan dan program yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan sudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Suatu organisasi yang berhasil dalam mencapai tujuannya dapat dilihat dari kinerja yang dicapainya. Apabila organisasi itu dapat mencapai tujuan organisasi sesuai dengan visi dan misinya, maka dapat dikatakan organisasi itu mempunyai kinerja tinggi, demikian pula sebaliknya. Pencapaian kinerja yang

tinggi dalam suatu organisasi tidak terlepas dari faktor-faktor yang terkait dengan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.

Dalam kaitan dengan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor itu menurut Joedono (1974) antara lain: 1) faktor kualitas sumber daya manusia, 2) struktur organisasi, 3) teknologi, 4) pimpinan dan masyarakat, dan 5) bentuk kepemimpinan. Bryson (1995) mengemukakan faktor yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi dalam pelaksanaan pekerjaan adalah faktor yang bersifat internal dan eksternal. Lebih lanjut dikemukakan Bryson bahwa untuk meningkatkan kinerja tersebut secara teoritis mencakup keseluruhan aspek-aspek yang mempengaruhi kinerja, yaitu aspek input atau sumber daya terdiri dari: 1) pengawasan sumber daya manusia, 2) anggaran, 3) sarana dan prasarana/fasilitas, 4) informasi, dan 5) budaya organisasi.

Bappenas (2009) mengemukakan pendekatan dalam pengukuran kinerja yaitu: relevansi, efektivitas, efisiensi, efektivitas biaya, kualitas, waktu dan produktivitas. Relevansi untuk menilai sejauh mana pembangunan yang dijalankan relevan terhadap sasaran atau kebutuhan apakah pembangunan yang dilakukan berkontribusi terhadap pencapaian baik tujuan spesifik maupun umum pembangunan daerah. Efisiensi, untuk mengetahui bagaimana masukan (*inputs*) dirubah menjadi keluaran (*outputs*). Efektivitas Biaya, untuk menggambarkan hubungan antara *input* dengan *outcomes* pembangunan. Kualitas, yaitu pengukuran derajat kesesuaian antara hasil-hasil pembangunan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Waktu, yaitu ketepatan waktu/periode pencapaian kinerja yang ditetapkan. Produktivitas, untuk melihat nilai tambah dari setiap tahapan proses pembangunan dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan.

Dalam penelitian ini untuk mengukur kinerja pembangunan daerah Provinsi Gorontalo dalam pelaksanaan RPJMD menggunakan pendekatan relevansi dan efektivitas.

2.2 Luaran Penelitian

Keluaran yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Adanya dokumen keterkaitan RPJMD Provinsi Gorontalo dengan RPJMN 2010-2014.
2. Adanya dokumen evaluasi tentang RPJMD Provinsi Gorontalo 2012-2017.
3. Adanya dokumen evaluasi pencapaian pelaksanaan RPJMD Provinsi Gorontalo 2007-2012.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Provinsi Gorontalo. Obyek yang diteliti adalah relevansi RPJMD dan RPJMN serta dokumen perencanaan terkait dan efektivitas kinerja Pembangunan Daerah.. Untuk mengkaji obyek penelitian ini digunakan metode survei yang merupakan pengumpulan data empirik berdasarkan angket, wawancara dan observasi. Kegiatan ini terdiri dari survei data sekunder dan survei data primer. Survei data sekunder dimaksudkan untuk mendapatkan data yang sudah tersedia yang berhubungan dengan dokumen perencanaan yang telah disusun baik nasional maupun provinsi serta indikator pencapaian kinerja daerah berdasarkan skala prioritas nasional, sedangkan survei data primer dilakukan pada stakeholder terkait untuk melengkapi data sekunder yang diperoleh. Data primer dalam penelitian ini berhubungan dengan informasi proses perencanaan yang dilakukan di tingkat provinsi

3.2 Definisi Operasional Variabel

Untuk mendapat gambaran yang jelas tentang variabel penelitian ini, berikut digambarkan definisi operasionalnya:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah dokumen perencanaan nasional 5 tahunan.
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah dalam 5 tahun.
- 3) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen rencana pembangunan daerah dalam kurun 25 tahun.
- 4) Relevansi adalah keterkaitan antara dokumen perencanaan yang berhubungan dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang ditetapkan.

- 5) Efektivitas adalah evaluasi terhadap kegiatan pembangunan apakah berkontribusi terhadap pencapaian baik tujuan spesifik maupun umum pembangunan daerah.
- 6) Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku dalam suatu lingkungan daerah pada jangka waktu tertentu
- 7) Kinerja Pembangunan daerah adalah tingkat kemampuan daerah dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan dokumen perencanaan yang telah disusun.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang berhubungan dengan indikator 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya, yaitu: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; Pendidikan; Kesehatan; Penanggulangan Kemiskinan; Ketahanan Pangan; Infrastruktur; Iklim Investasi dan Iklim Usaha; Energi; Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik; dan Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi; Kesejahteraan Rakyat; Politik, Hukum, dan Keamanan; dan Perekonomian. Data sekunder lainnya berhubungan dengan dokumen perencanaan yaitu: RPJMN 2010-2014; RPJMD Provinsi Gorontalo 2007-2014; RPJMD Provinsi Gorontalo 2012-2017; RPJPD Provinsi Gorontalo 2009-2025; dan dokumen MP3EI.

. Data sekunder diperoleh dari Bappenas, Bappeda, Kantor Statistik Provinsi Gorontalo, Satuan Kerja Pemerintah Daerah terkait.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dan informasi, teknik yang digunakan adalah Teknik dokumenter, pengamatan langsung dan wawancara mendalam. Teknik dokumenter digunakan untuk memperoleh trend data sesuai tujuan penelitian, pengamatan langsung dilakukan kepada masyarakat sebagai objek

pembangunan, sedangkan wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi yang rinci terhadap masalah yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

3.5 Metode Analisis Data

Fokus penelitian ini sebagaimana tujuan penelitian adalah menganalisis relevansi dan efektivitas kinerja pembangunan daerah. Relevansi digunakan untuk menganalisa sejauh mana tujuan/sasaran pembangunan yang direncanakan mampu menjawab permasalahan utama/tantangan. Dalam hal ini, relevansi pembangunan daerah dilihat apakah tren capaian pembangunan daerah sejalan atau lebih baik dari capaian pembangunan nasional. Sedangkan efektivitas digunakan untuk mengukur dan melihat kesesuaian antara hasil dan dampak pembangunan terhadap tujuan yang diharapkan. Efektivitas pembangunan dapat dilihat dari sejauh mana capaian pembangunan daerah membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Untuk analisis data digunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif untuk menganalisis relevansi, sedangkan untuk efektivitas kinerja menggunakan analisis kuantitatif-deskriptif berupa penyajian tabel-tabel, rasio dan persentase.

Tabel 3.1 Ringkasan Tujuan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data dan Output Penelitian

Tujuan Penelitian	Teknik Pengumpulan Informasi / Data	Analisis Data	Output
Relevansi RPJMD Provinsi Gorontalo siklus 2007-2012 dan 2012-2017 dengan RPJMN 2010-2014	Review data dan dokumen Bappeda, dan Bappenas	analisis dekriptif kualitatif	Dokumen keterkaitan RPJMD Provinsi Gorontalo dengan RPJMN 2010-2014
Keterkaitan RPJMD 2007-2012 dengan RPJMD 2012-2017 Provinsi Gorontalo	Review data dan dokumen Bappeda	analisis dekriptif kualitatif	
Keterkaitan RPJMD 2007-2012 dengan RPJMD 2012-2017 Provinsi Gorontalo	Review data dan dokumen Bappeda	analisis dekriptif kualitatif	
relevansi arah, kebijakan dan strategi pembangunan RPJMD 2012-2017 dengan RPJPD 2009-2025 Provinsi Gorontalo	Review data dan dokumen Bappeda	analisis dekriptif kualitatif	Dokumen evaluasi tentang RPJMD Provinsi Gorontalo 2012-2017
relevansi RPJMD Provinsi Gorontalo dengan Koridor Ekonomi Sulawesi berdasarkan MP3EI 2011-2025	Review data/dokumen dari Bappenas dan Bappeda	analisis dekriptif kualitatif	
efektivitas pelaksanaan indikator prioritas pembangunan RPJMN 2010-2014	Review data sekunder dari SKPD terkait	Analisis deskriptif kuantitatif	Dokumen evaluasi pencapaian pelaksanaan RPJMD Provinsi Gorontalo 2007-2012

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Letak dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Gorontalo terletak di antara 0°19' – 1°15' Lintang Utara dan 121°23' - 123° 43' Bujur Timur. Dari posisi tersebut wilayah ini berbatasan langsung dengan dua Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat dan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Timur. Sedangkan di sebelah Utara berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi dan di sebelah Selatan dibatasi oleh Teluk Tomini.

4.1.2 Luas wilayah

Luas wilayah Provinsi Gorontalo 11.967,64 km², jika dibandingkan dengan Wilayah Indonesia luas Provinsi ini hanya sebesar 0,63 persen. Saat ini, Provinsi Gorontalo memiliki 6 (enam) wilayah pemerintahan yakni 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang terdiri dari Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango , Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo. Dari keenam wilayah ini Kabupaten Pohuwato memiliki luas wilayah terbesar diikuti oleh kab. Boalemo, sedangkan Kota Gorontalo memiliki luas wilayah terkecil sebesar 0,53 % dari total luas wilayah Gorontalo.

4.1.3 Jumlah Penduduk dan Tenaga Kerja

Pada tahun 2010 jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo adalah sebanyak 1.040.164. Dari jumlah ini 34,22 % adalah penduduk Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan luas wilayah, kota Gorontalo yang hanya punya wilayah seluas 64,69 Km² memiliki tingkat kepadatan yang tertinggi dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo, 2006-2010

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
Kabupaten:						
01	Gorontalo	431.440	338.381	339.620	340.730	355.988
02	Boalemo	118.947	123.243	127.639	128.540	129.253
03	Pohuwato	110.481	112.532	114.572	116.203	128.748
04	Bone Bolango	127.977	129.025	130.025	131.781	141.915
05	Gorontalo Utara		94.829	95.177	96.489	104.133
Kota:						
06	Gorontalo	159.455	162.325	165.175	170.209	180.127
Provinsi Gorontalo		948.300	960.335	972.208	983.952	1.040.164

Sumber: Dokumen RPJMD Provinsi Gorontalo, 2012-2017

Berdasarkan perbandingan jumlah penduduk dari tahun 2000 yang berjumlah 830.184 dan tahun 2010, maka laju pertumbuhan penduduk Provinsi Gorontalo 2000-2010 adalah 2,28%.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Gorontalo.

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk		Pertumbuhan
	2000	2010	2000 – 2010
Kabupaten Gorontalo	309.663	355.988	1,40
Kabupaten Boalemo	90.538	129.253	3,62
Kabupaten Pohuwato	93.505	128.748	3,25
Kabupaten Bone Bolango	114.766	141.915	2,15
Kabupaten Gorontalo Utara	86.781	104.133	1,84
Kota Gorontalo	134.931	180.127	2,93
Provinsi Gorontalo	830.184	1.040.164	2,28

Sumber: Dokumen RPJMD Provinsi Gorontalo, 2012-2017

Struktur ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo pada Tahun 2010 menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk yang berumur 15 tahun keatas sebesar 708.681, yang merupakan angkatan kerja sebesar 456.499 atau sebesar 64.41 persen. Dari jumlah tersebut yang sedang bekerja sebesar 432.926 atau 94.84 persen dan yang menganggur sebesar **23.573 atau 5.16 persen**. Sementara yang bukan merupakan angkatan kerja yaitu penduduk yang mengurus rumah tangga, bersekolah dan lainnya (kegiatan selain mengurus rumah tangga maupun bersekolah) sebanyak 252.182 atau 35.58 persen dengan

jumlah terbanyak pada yang mengurus rumah tangga yaitu sebesar 159.541 atau 63.26 persen dan bersekolah sebanyak 57.980 atau 22.99 persen dan lain-lain (yang bukan mengurus rumah tangga dan bersekolah) sebanyak 34.661 atau 13.74 persen.

Tabel 4.3 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama Provinsi Gorontalo

Jenis Kegiatan Utama	2008	2009	2010
I. Angkatan Kerja	429.384	447.313	456.499
1. Bekerja	405.126	420.962	432.926
2. Menganggur	24.258	26.351	23.573
II. Bukan Angkatan Kerja	258.697	254.182	252.182
1. Sekolah	58.748	62.316	57.980
2. Mengurus Rumah Tangga	165.379	161.296	159.541
3. Lainnya	34.570	30.570	34.661
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	62,40	63,77	64.42
Tingkat Pengangguran	5,65	5,89	5.16

Sumber: Dokumen RPJMD Provinsi Gorontalo, 2012-2017

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Gorontalo Tahun 2010, sebesar 64,42%. Posisi angka tersebut mengalami peningkatan dibanding Tahun 2009 yang hanya sebesar 63,77%. Sementara itu jumlah pengangguran Tahun 2010 sebesar 23.573 orang, atau 5,16% dari jumlah angkatan kerjanya, jumlah tersebut mengalami penurunan sebanyak 2.778 orang dari Tahun 2009. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Gorontalo selama tiga tahun terakhir sedikit berfluktuasi yaitu di tahun 2008 5,65%, kemudian meningkat menjadi 5,89% di Tahun 2009, dan pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 5,16%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tingkat pengangguran nasional tahun 2010 sebesar 7,14%.

Tabel 4.4 Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha tahun 2008 – 2010

Sektor Ekonomi	2008	2009	2010
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan	184.148	172.130	176.974
Pertambangan dan Penggalian	5.194	6.694	9.186
Industri	34.268	32.431	35.228
Listrik, Gas, dan Air Minum	642	554	679
Konstruksi	22.344	28.360	20.296
Perdagangan, Rumah makan dan Jasa Akomodasi	59.610	69.315	71.243
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	32.214	35.301	33.351
Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	2.986	4.126	4.647
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	63.720	72.051	81.322
Total	405.126	420.962	432.926

Sumber: Dokumen RPJMD Provinsi Gorontalo, 2012-2017

Dari Tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa jumlah tenaga kerja di Provinsi Gorontalo setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 jumlah tenaga kerja berjumlah 405.126 dan pada tahun 2009 berubah menjadi 420.962 mengalami peningkatan sejumlah 15.836 atau sebesar 3.90 persen. Sedangkan pada tahun 2010 jumlah tenaga kerja berada pada angka 432.926 meningkat sebesar 11.964 atau 2.84 persen dari jumlah tenaga kerja pada tahun sebelumnya. Sementara sektor yang menjadi primadona dengan meraup tenaga kerja terbesar masih berasal dari sektor pertanian yang pada tahun 2010 meraup tenaga kerja sebanyak 176.974, disusul oleh sektor jasa kemasyarakatan sebesar 81.322 ditempat ketiga sektor perdagangan rumah makan dan jasa akomodasi sebesar 71.243. sedangkan sektor yang paling sedikit meraup tenaga kerja pada tahun 2010 adalah sektor Listrik, gas dan air minum sebesar 679 yang disusul sektor lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan.

2.1.4 Sumber Daya Alam

Provinsi Gorontalo memiliki sumberdaya alam yang cukup potensial untuk dikembangkan, terutama pertanian, perikanan, kehutanan, perkebunan dan pertambangan. Potensi pertanian dan perikanan merupakan sektor yang menjadi prioritas pengembangan yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Apalagi sebagian besar mata pencaharian penduduk bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan. Lahan pertanian yang ada sebagian besar diusahakan oleh masyarakat untuk menanam sejumlah komoditi utama seperti padi sawah dan jagung. Dalam rangka pengembangan Program Agropolitan, jagung dijadikan komoditi unggulan.

Dari luas wilayah Provinsi Gorontalo 11.967,64 Km² atau 1.196.764 Ha, dimana untuk potensi lahan sawah yang ditanami padi seluas ± 29.566 ha yang terdiri dari sawah irigasi ± 22.015 ha dan sawah non irigasi seluas 7.551 ha. Juga terdapat lahan bukan sawah seluas 558.840 ha, ladang/huma 74.466 ha, lahan yang sementara tidak digunakan 95.872 ha, lainnya perkebunan, hutan rakyat, tambak, kolam/ltebat/empang, dan lain-lain seluas 237.343 ha.

Penggerak kedua perekonomian Gorontalo adalah sektor perikanan. Potensi perikanan dan kelautan yang ada menjadi modal dasar pembangunan Provinsi Gorontalo. Sektor perikanan dan kelautan Provinsi Gorontalo mempunyai potensi yang begitu besar yang akan menjadi modal dasar pembangunan Provinsi Gorontalo. Dimana Luas perairan Gorontalo mencapai 50.500 km² yang terdiri dari luas wilayah laut Teluk Tomini 7.400 km² , laut Sulawesi 3.100 km² dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) laut Sulawesi 40.000 km² serta panjang garis pantai 655,8 km yang meliputi wilayah pantai utara (laut Sulawesi) 217,7 km dan wilayah pantai selatan (Teluk Tomini) 438,1 km. Potensi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengembangan usaha perikanan tangkap, budidaya maupun pengembangan potensi perikanan lainnya.

Untuk bidang Kehutanan isu yang masih dihadapi saat ini adalah masih luasnya lahan kritis dalam kawasan, pemanfaatan/penggunaan lahan untuk kepentingan non kehutanan secara illegal dalam kawasan hutan, perambahan dan pencurian kayu (*illegal logging*), alih fungsi kawasan hutan terkait tata ruang serta isu perubahan iklim terkait hutan. Luas lahan kritis Provinsi Gorontalo saat

ini adalah 185.152 Ha (sudah 10% kawasan hutan yang dalam kondisi kritis). Berkaitan dengan hal tersebut maka pemerintah harus terus melakukan upaya-upaya pelestarian dan pemanfaatan hutan secaranda Tata Kelola dan Prioritas 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha)

Ketiga, Penguatan Infrastruktur Sosial (Prioritas 2 Pendidikan, Prioritas 3 Kesehatan, Prioritas 4 Penanggulangan Kemiskinan dan Prioritas 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana)

Keempat, Pembangunan Kreativitas (Prioritas 11 Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi).

4.2 Relevansi RPJMD Provinsi Gorontalo siklus 2007-2012 dan 2012-2017 dengan RPJMN 2010-2014

4.2.1 Fokus RPJMN 2010-2014

Visi pembangunan nasional berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 adalah : “Terwujudnya Indonesia yang sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”. Penjelasan visi ini sebagai berikut:

Kesejahteraan Rakyat. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Demokrasi. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.

Keadilan. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

Pada periode 2010-2014, bangsa Indonesia harus terus berupaya keras untuk mencapai perbaikan di bidang kesejahteraan rakyat, membangun keadilan, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas demokrasi, serta menjaga kesatuan dan keamanan negara. Misi Pembangunan Indonesia

2010-2014 merupakan bagian awal dari proses menuju cita-cita tersebut. Dalam menjalankan misinya, Indonesia tidak dapat terlepas dari pengaruh kondisi regional dan pengaruh global. Krisis dan gejolak harga pangan dan energi serta krisis ekonomi global yang terjadi sejak awal 2008 dan belum pulih sepenuhnya hingga saat ini, telah mempengaruhi kondisi dunia. Ekonomi dunia mengalami kontraksi ekonomi pada tahun 2009, yang disebabkan rusaknya lembaga-lembaga keuangan dunia yang pada akhirnya akan mempengaruhi secara negatif kegiatan ekonomi riil dan perdagangan dunia. Pada akhirnya tingkat kesejahteraan masyarakat dunia akan mengalami penurunan, dan target penurunan kemiskinan global pada 2015 seperti yang tertuang dalam *Millenium Development Goals* (MDG) juga akan mengalami hambatan.

Usaha-usaha Perwujudan visi Indonesia 2014 akan dijabarkan dalam misi pemerintah tahun 2010-2014 sebagai berikut:

Misi 1: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera

Misi 2: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi

Misi 3: Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2010-2014, ditetapkan lima agenda utama pembangunan nasional tahun 2010-2014, yaitu:

Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi

Agenda IV : Penegakkan Hukum dan Pemberantasan Korupsi

Agenda V : Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan

Dalam mewujudkan visi, misi dan agenda 2010-2014 ditetapkan 3 sasaran pokok yaitu:

Sasaran I : Sasaran Pembangunan Kesejahteraan Rakyat, yang meliputi : ekonomi, pendidikan, kesehatan, pangan, energi, infrastruktur,

Sasaran II : Perkuatan Pembangunan Demokrasi

Sasaran III: Penegakan Hukum.

Arah kebijakan umum pembangunan nasional 2010-2014 sebagai berikut:

1. Arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera. Indonesia yang sejahtera tercermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan.
2. Arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan yang bertanggung jawab.
3. Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan gender. Keadilan juga hanya dapat diwujudkan bila sistem hukum berfungsi secara kredibel, bersih, adil dan tidak pandang bulu. Demikian pula kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten diperlukan agar tercapai rasa keadilan dan pemerintahan yang bersih.

Visi dan Misi pemerintah 2010-2014, dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Sebelas Prioritas Nasional di bawah ini bertujuan untuk sejumlah tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara di masa mendatang. Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari 11 prioritas nasional yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Di samping sebelas prioritas nasional tersebut di atas, upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Nasional juga melalui pencapaian prioritas nasional lainnya di bidang politik, hukum, dan keamanan, di bidang perekonomian, dan di bidang kesejahteraan rakyat.

4.2.2 Fokus RPJMD 2007-2012

RPJMD Provinsi Gorontalo 2007-2012 ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2007 tanggal, Juni 2007. Secara substansi RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2012 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program. Visi Pembangunan Gorontalo 2007 – 2012, adalah: “*Gorontalo Provinsi Inovatif¹*”. Untuk pencapaian visi pembangunan tersebut ditetapkan Misi Pembangunan Gorontalo 2007–2012, yaitu: “Membangun Gorontalo yang Mandiri, Produktif dan Religius”.

- **Inovatif:** Suatu orientasi sikap dan perilaku yang menghargai penemuan (*invention*), perluasan (*extension*), *creative replication* dan sintesis yang diarahkan untuk menghasilkan nilai tambah melalui suatu kebaruan dari ide, metode, proses alat, dan produk sehingga menghasilkan sesuatu yang unggul.
- **Mandiri:** Adalah suatu sikap dan keadaan yang ditandai dengan tumbuhnya kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan mengandalkan potensi yang dimiliki, kemampuan mengendalikan lingkungan eksternal, otonom dalam mengambil keputusan dan tindakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi.
- **Produktif:** Adalah suatu orientasi sikap dan tindakan yang mengedepankan penambahan hasil. Sebagai gambaran cara berfikir produktif adalah selalu membandingkan hasil sekarang dengan hasil sebelumnya, hasil yang dimiliki dibandingkan dengan pihak lain.
- **Religius:** Adalah suatu orientasi sikap yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama sebagai dasar etika dan panduan perilaku dalam melaksanakan pembangunan di Gorontalo.

Tujuan strategis yang ingin dicapai Pembangunan Gorontalo 2007-2012 adalah: 1) mewujudkan Gorontalo yang mandiri; 2) Membangun ekonomi rakyat yang produktif; dan 3) Mewujudkan Gorontalo yang religius.

Untuk tercapainya visi, misi dan tujuan strategis di atas, maka 4 (empat) agenda pokok pembangunan yang dijalankan, yaitu :

- a. Inovasi Kepemerintahan Wirausaha
- b. Inovasi Pengembangan SDM yang Berorientasi Wirausaha, Mandiri dan Religius.
- c. Inovasi dalam Menumbuh-Kembangkan Ekonomi Rakyat Berbasis Desa.
- d. Inovasi Teknologi Tepat Guna untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.

4.2.3 Fokus RPJMD 2012-2017

Berdasarkan RPJMD 2012-2017 telah ditetapkan Visi Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo adalah "Terwujudnya Percepatan Pembangunan Berbagai Bidang serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berkeadilan di Provinsi Gorontalo". Visi ini mengandung 2 (dua) unsur penting yaitu pertama, "Mewujudkan Percepatan Pembangunan di berbagai bidang". Kedua, "Peningkatan Ekonomi Masyarakat Yang Berkeadilan". Untuk pencapaian visi, maka ditetapkan misi yaitu:

- a. Memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi potensi kewilayahan, mendorong laju investasi, percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan, sekaligus mengembangkan potensi unggulan dengan mengakselerasi secara cerdas terhadap pencapaian kesejahteraan rakyat.
- b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendekatan kesesuaian keahlian serta pemenuhan mutu kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan Kesehatan.
- c. Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi sumber daya Kelautan, Pertanian, Peternakan, kehutanan, Danau Limboto dan potensi lingkungan lainnya yang lebih baik, saling terintegrasi serta lestari demi kepentingan kemakmuran masyarakat.

- d. mengembangkan nilai-nilai religi, dalam kehidupan beragama yang rukun penuh kesejukan sekaligus memelihara keragaman budaya. Serta memperkuat peran Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan terhadap anak, termasuk issue kesetaraan Gender dalam Pembangunan.
- e. Menciptakan sinergitas diantara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Gorontalo dalam kaidah otonomi daerah sekaligus untuk meningkatkan kinerja pelayanan public, menurunkan angka kemiskinan serta menjalankan sistem tata pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi.

Misi Pertama diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dalam hal pencapaian peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat serta laju investasi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota sehingga rakyat Provinsi Gorontalo lebih cepat keluar dari belenggu kemiskinan, pengangguran, minimnya sandang, pangan dan papan, sekaligus pemenuhan keterbatasan infrastruktur dasar Jalan, Jembatan, Air Bersih, Listrik yang selama ini dikeluhkan oleh khususnya masyarakat pedesaan.

Misi Kedua ditargetkan untuk mempersiapkan sumber daya manusia dengan tingkat kualitas siap pakai, sekaligus bertujuan memberikan jaminan yang memadai melalui layanan “Gratis” terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar hingga menengah, termasuk dibidang kesehatan melalui pola insentif yang diistilahkan *Universal Total Coverage*.

Hal ini menjadi peran strategis untuk memastikan pemerintah daerah menciptakan sistem yang berkeadilan dari akses maupun mutu layanan yang baik khususnya bagi warga miskin.

Misi Ketiga diarahkan untuk meningkatkan produktivitas terhadap potensi sumber daya alam Kelautan, Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Danau Limboto termasuk sumber daya pesisir yang termasuk dalam satu kesatuan wilayah Daerah Aliran Sungai, yang dikelola secara terpadu dan berkelanjutan tanpa merusak daya dukung lingkungan alamnya. Peningkatan produktivitas sektor-sektor tersebut diharapkan akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Misi Keempat diarahkan untuk pengembangan kemandirian dengan menumbuhkembangkan semangat partisipasi dan gotong royong, pencerahan terhadap nilai-nilai Agama, sekaligus mempertahankan nilai-nilai Adat Istiadat, serta melakukan pemberdayaan perempuan termasuk perlindungan anak dan kesetaraan gender.

Misi Kelima diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam perspektif otonomi daerah dan *Good Governance* termasuk mendorong penguatan kerjasama daerah dan membangun koordinasi provinsi dan kab/kota untuk mendorong pencapaian target pembangunan daerah.

Sesuai arahan visi dan misi di atas, maka tujuan dan sasaran untuk pencapaian keberhasilan pembangunan daerah sebagai berikut :

Tujuan I : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebesar 8 %
- b. Meningkatnya lapangan kerja

Tujuan II : Menyediakan Infrastruktur untuk percepatan pembangunan daerah, dengan sasaran Meningkatnya Infrastruktur daerah

Tujuan III : Meningkatkan kualitas Pendidikan daerah, dengan sasaran Meningkatnya kualitas pendidikan

Tujuan ke IV : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan sasaran Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

Tujuan ke V : Mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk kemakmuran masyarakat, dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam
- b. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup

Tujuan ke VI : Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, dengan sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Tujuan ke VII : Memelihara keragaman Agama dan Budaya, dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Umat Beragama
- b. Meningkatnya pelestarian budaya daerah

Tujuan ke VIII : Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, dengan sasaran Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak

Tujuan ke IX : Mengembangkan *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dalam pelayanan pada masyarakat

Tujuan ke X : Pengentasan Kemiskinan, dengan sasaran Berkurangnya persentase masyarakat miskin.

4.2.4 Analisis Relevansi

1. Relevansi RPJMD 2007-2012 dengan RPJMN 2010-2014

Berdasarkan uraian di atas visi nasional dalam RPJMN 2010-2014 “Terwujudnya Indonesia yang sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”. Visi ini tidak tergambar secara jelas pada visi RPJMD Provinsi Gorontalo 2007-2012 yaitu: :“*Gorontalo Provinsi Inovatif*”¹. Meskipun demikian visi nasional tergambar misi dan penjabarannya, “Membangun Gorontalo yang Mandiri, Produktif dan Religius”.

Dalam hal implementasi pencapaian visi dan misi nasional RPJMD Provinsi Gorontalo 2007-2012 tidak secara spesifik menyebutkan tentang prioritas pembangunan sebagaimana yang dijabarkan dalam RPJMN 2010-2014. Meskipun prioritas nasional tidak secara jelas disebutkan, tetapi implementasi prioritas nasional terjabarkan dalam agenda utama, program kerja SKPD, program kerja lintas SKPD dan indikator keberhasilan yang akan dicapai. Berbagai program aksi RPJMN 2010-2014 merupakan program payung dari implementasi program SKPD maupun lintas SKPD. Hal ini dapat dilihat pada prioritas dan program aksi pembangunan nasional dan Provinsi Gorontalo sebagaimana uraian pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Relevansi Prioritas dan Program Aksi dalam RPJMN 2010-2014 dengan RPJMD Provinsi Gorontalo 2007-2012

No	RPJMN 2010-2014		RPJMD Provinsi 2007-2012	
	Prioritas Pembangunan	Program Aksi	Prioritas Pembangunan	Program
1	PRIORITAS 1. REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA			
		<p>Otonomi Daerah; Penataan otonomi daerah melalui</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penghentian/pembatasan pemekaran wilayah; ▪ Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah; ▪ Penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah; 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ .Program penataan daerah otonomi baru ▪ Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah ▪ pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
		<p>Regulasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Percepatan harmo-nisasi dan sinkroni-sasi peraturan per-undangan di tingkat pusat dan daerah peraturan daerah lambatnya 2011; 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program penataan peraturan perundang-undangan
		Sinergi Antara Pusat dan Daerah;		

No	RPJMN 2010-2014		RPJMD Provinsi 2007-2012	
	Prioritas Pembangunan	Program Aksi	Prioritas Pembangunan	Program
		<ul style="list-style-type: none"> Penetapan dan pe nerapan sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 	<ul style="list-style-type: none"> 	Pengembangan SDM aparatur daerah untuk membangun kapasitas dalam memberikan pelayanan publik.
		<p>Penegakan Hukum;</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum 		
		<p>Data Kependudukan;</p> <ul style="list-style-type: none"> Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan aplikasi pertama pada kartu tanda penduduk selambat-lambatnya pada 2011. 	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none"> Program Penataan Administrasi Kependudukan
2	PRIORITAS PENDIDIKAN	2.	Pendidikan	

No	RPJMN 2010-2014		RPJMD Provinsi 2007-2012	
	Prioritas Pembangunan	Program Aksi	Prioritas Pembangunan	Program
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar ▪ APM pendidikan setingkat SMP ▪ Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan setingkat SMA ▪ Pemantapan/rasionalisasi implementasi BOS, ▪ Penurunan harga buku standar di tingkat sekolah dasar dan menengah sebesar 30-50% selambat-lambatnya 2012 dan ▪ Penyediaan sambungan internet ber-content pendidikan ke sekolah tingkat menengah selambat-lambatnya 2012 dan terus diperluas ke tingkat sekolah dasar; 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun ▪ Program pendidikan menengah ▪ Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

No	RPJMN 2010-2014		RPJMD Provinsi 2007-2012	
	Prioritas Pembangunan	Program Aksi	Prioritas Pembangunan	Program
		Akses Pendidikan Tinggi; <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan APK pendidikan tinggi 		
		Metodologi; <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerapan metodologi pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian (<i>teaching to the test</i>), 		
		Pengelolaan; <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberdayaan peran kepala seko-lah sebagai manajer sistem pendidikan yang unggul,Revita-lisasi peran pengawas sekolah sebagai entitas <i>quality assurance</i>, ▪ Mendorong aktivasi peran Komite Seko-lah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepen-tingan dalam proses pembelajaran, dan Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kualitas manajemen internal institusi pengelola pendidikan untuk mendukung peningkatan kualitas
		Kurikulum; <ul style="list-style-type: none"> • Penataan ulang kurikulum sekolah 		<ul style="list-style-type: none"> • Memasukan unsur kewirausahaan sebagai bagian dari kurikulum setiap jenjang pendidikan

No	RPJMN 2010-2014		RPJMD Provinsi 2007-2012	
	Prioritas Pembangunan	Program Aksi	Prioritas Pembangunan	Program
				<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Pendidikan Berbasis Kawasan Untuk mendukung berkembangnya komoditas unggulan daerah
		<u>Kualitas;</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kualitas guru, pengelolaan dan layanan sekolah 		<u>Kualitas</u> <ul style="list-style-type: none"> • Penyempurnaan kualitas proses belajar mengajar pada setiap institusi pendidikan
3	PRIORITAS 3 : KESEHATAN		Layanan kesehatan yang berkualitas	
		<u>Kesehatan Masyarakat;</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan Program Kesehatan Preventif Terpadu 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intensifikasi penyuluhan pola hidup sehat
		<u>KB;</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB melalui 23.500 klinik pemerintah dan swasta selama 2010-2014; 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
		<u>Obat:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberlakuan Daftar Obat Esensial Nasional sebagai dasar pengadaan obat di seluruh Indonesia dan pembatasan harga obat generik 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, pengawasan obat dan

No	RPJMN 2010-2014		RPJMD Provinsi 2007-2012	
	Prioritas Pembangunan	Program Aksi	Prioritas Pembangunan	Program
		bermerek pada 2010;		makanan serta pengembangan obat asli indonesia
		Asuransi Kesehatan Nasional:		
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerapan Asuransi Kesehatan Nasional untuk seluruh keluarga miskin dengan cakupan 100% pada 2011 dan diperluas secara bertahap untuk keluarga Indonesia lainnya antara 2012-2014 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
4	PRIORITAS 4 : PENANGGULANG AN KEMISKINAN		kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan	
		Bantuan Sosial Terpadu:		

No	RPJMN 2010-2014		RPJMD Provinsi 2007-2012	
	Prioritas Pembangunan	Program Aksi	Prioritas Pembangunan	Program
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Integrasi program perlindungan sosial berbasis keluarga yang mencakup program Bantuan Langsung Tunai ▪ Bantuan pangan, jaminan sosial bidang kesehatan, beasiswa bagi anak keluarga berpendapatan rendah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Parenting Education mulai 2010 dan program keluarga harapan diperluas menjadi program nasional mulai 2011—2012; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya ▪ Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
		PNPM Mandiri:		

No	RPJMN 2010-2014		RPJMD Provinsi 2007-2012	
	Prioritas Pembangunan	Program Aksi	Prioritas Pembangunan	Program
		<ul style="list-style-type: none"> Penambahan anggaran PNPM Mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none">
		<p>Kredit Usaha Rakyat (KUR):</p> <ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan penyempurnaan mekanisme penyaluran KUR mulai 2010 dan perluasan cakupan KUR mulai 2011; 	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none"> Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
		<p>Tim Penanggulangan Kemiskinan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Revitalisasi Komite Nasional Penanggulangan Kemiskinan di bawah koordinasi Wakil Presiden 	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan Badan Penanggulan kemiskinan
5	PRIORITAS 5 : PROGRAM AKSI DIBIDANG PANGAN			
		Lahan, Pengembangan Kawasan dan Tata Ruang Pertanian:		

No	RPJMN 2010-2014		RPJMD Provinsi 2007-2012	
	Prioritas Pembangunan	Program Aksi	Prioritas Pembangunan	Program
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian, ▪ Pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta hektar, penertiban serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
		<p>Infrastruktur:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan, pengairan, jaringan listrik, serta teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya; 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
		<p>Penelitian dan Pengembangan:</p>		

No	RPJMN 2010-2014		RPJMD Provinsi 2007-2012	
	Prioritas Pembangunan	Program Aksi	Prioritas Pembangunan	Program
		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi; 	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none"> peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
		<p>Investasi, Pembiayaan, dan Subsidi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan pembiayaan yang terjangkau. 	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none"> Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
		<p>Pangan dan Gizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui peningkatan pola pangan harapan; 	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none"> Perbaiki gizi masyarakat
		<p>Adaptasi Perubahan Iklim:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengambilan langkah-langkah kongkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim. 	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none">

No	RPJMN 2010-2014		RPJMD Provinsi 2007-2012	
	Prioritas Pembangunan	Program Aksi	Prioritas Pembangunan	Program
6	PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR		Percepatan pembangunan infrastruktur	
		Tanah dan tata ruang:		
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh di bawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah ▪ Pengembangan sistem informasi pertanahan
		Perhubungan:		Perhubungan

No	RPJMN 2010-2014		RPJMD Provinsi 2007-2012	
	Prioritas Pembangunan	Program Aksi	Prioritas Pembangunan	Program
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau yang terintegrasi sesuai dengan Sistem Transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda dan penurunan tingkat kecelakaan transportasi sehingga pada 2014 lebih kecil dari 50% keadaan saat ini; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan para sarana dan fasilitas perhubungan • Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ • Peningkatan pelayanan angkutan • Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan • Peningkatan dan pengamanan lalu lintas • Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
		<p>Pengendalian banjir:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyelesaian pembangunan prasarana pengendalian banjir 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan kanal pengendali banjir
		<p>Transportasi perkotaan:</p>		

No	RPJMN 2010-2014		RPJMD Provinsi 2007-2012	
	Prioritas Pembangunan	Program Aksi	Prioritas Pembangunan	Program
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaiki sistem dan jaringan transportasi di 4 kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pembangunan jalan dan jembatan
7	PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA			
		Kepastian hukum:		
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪
		Kebijakan ketenagakerjaan:		
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka memperluas penciptaan lapangan kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja • Peningkatan kesempatan kerja • Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
8	PRIORITAS 8 : ENERGI			
		Energi alternatif:		

No	RPJMN 2010-2014		RPJMD Provinsi 2007-2012	
	Prioritas Pembangunan	Program Aksi	Prioritas Pembangunan	Program
		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif <i>geothermal</i> sehingga mencapai 2.000 MW pada 2012 dan 5.000 MW pada 2014 	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none"> Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
		<p>Hasil ikutan dan turunan minyak bumi/gas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Revitalisasi industri pengolah hasil ikutan/turunan minyak bumi dan gas sebagai bahan baku industri tekstil, pupuk dan industri hilir lainnya; 	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none">
		<p>Konversi menuju penggunaan gas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perluasan program kon-versi minyak tanah ke gas sehingga men-cakup 42 juta Kepala Keluarga pada 2010; Penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan di Palembang, Surabaya, dan Denpasar. 	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none">
9	PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA			
		Perubahan iklim:		

No	RPJMN 2010-2014		RPJMD Provinsi 2007-2012	
	Prioritas Pembangunan	Program Aksi	Prioritas Pembangunan	Program
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut, 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500,000 ha per tahun, 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program rehabilitasi hutan dan lahan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
		<p>Pengendalian Kerusakan Lingkungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di 680 kegiatan industri dan jasa pada 2010 dan terus berlanjut; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan ▪ pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
		<p>Sistem Peringatan Dini:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS) dan Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) mulai 2010 dan seterusnya, serta Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada 2013; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪

No	RPJMN 2010-2014		RPJMD Provinsi 2007-2012	
	Prioritas Pembangunan	Program Aksi	Prioritas Pembangunan	Program
		Penanggulangan bencana: <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kemampuan penanggulangan bencana 		Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
10	PRIORITAS 10 : DAERAH TERDEPEN, TERLUAR, TERTINGGAL DAN PASCA KONFLIK			
		Kebijakan: <ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya 		
		Keutuhan wilayah: <ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010; 		<ul style="list-style-type: none"> Program pengembangan wilayah perbatasan
		Daerah tertinggal: <ul style="list-style-type: none"> Pengentasan paling lambat 2014. 		
11	PRIORITAS 11 : KEBUDAYAAN, KREATIFITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI			

No	RPJMN 2010-2014		RPJMD Provinsi 2007-2012	
	Prioritas Pembangunan	Program Aksi	Prioritas Pembangunan	Program
		Perawatan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya, 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan pengelolaan nilai budaya, kekayaan budaya dan keragaman budaya
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia ditargetkan sebelum Oktober 2011; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪
		Sarana: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibu kota kabupaten selambat-lambatnya Oktober 2012; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪
		Kebijakan:		

No	RPJMN 2010-2014		RPJMD Provinsi 2007-2012	
	Prioritas Pembangunan	Program Aksi	Prioritas Pembangunan	Program
		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya; 	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none"> Program pelestarian bahasa dan budaya Gorontalo Penguatan kelembagaan adat
		<p>Inovasi teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif yang mencakup pengelolaan sumber daya maritim menuju ketahanan energi, pangan, dan antisipasi perubahan iklim; dan pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda. 	<p>TEKNOLOGI TEPAT GUNA</p> <ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kerjasama dalam pengembangan teknologi tepat guna Pengembangan industri kecil menengah yang berbasis komoditi unggulan Pengembangan unit khusus yang berfungsi untuk melakukan identifikasi dan koleksi teknologi tepat guna yang relevan

No	RPJMN 2010-2014		RPJMD Provinsi 2007-2012	
	Prioritas Pembangunan	Program Aksi	Prioritas Pembangunan	Program
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Politik, Hukum, dan Keamanan lainnya 	PEMERINTAHAN	Kapasitas Aparatur Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyempurnaan sistem dan manajemen kepegawaian di seluruh instansi propinsi, kabupaten dan kota ▪ Peningkatan wawasan kebangsaan aparatur
				Sarana dan Prasarana Layanan Prima <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan infrastruktur lingkup propinsi, kabupaten dan kota untuk mendukung kinerja aparatur ▪ Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang handal ▪ Penggambungan unit-unit pelayanan dalam satu atap
				Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kualitas perencanaan ▪ Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan

No	RPJMN 2010-2014		RPJMD Provinsi 2007-2012	
	Prioritas Pembangunan	Program Aksi	Prioritas Pembangunan	Program
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kualitas koordinasi
				<p>Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Aparatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyempurnaan dan peningkatan kualitas sistem pengawasan dan evaluasi kinerja aparatur ▪ Identifikasi '<i>best practices</i>' pemerintahan ▪ Evaluasi organisasi dan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan ▪ Restrukturisasi organisasi pemerintahan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesejahteraan lainnya 	Kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan sumber-sumber belajar yang bersifat on-line sampai tingkat kecamatan yang berkaitan dengan kewirausahaan ▪ Pelaksanaan training relevan bagi masyarakat, dalam rangka pengembangan desa mandiri

No	RPJMN 2010-2014		RPJMD Provinsi 2007-2012	
	Prioritas Pembangunan	Program Aksi	Prioritas Pembangunan	Program
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Optimalisasi kegiatan-kegiatan penyebaran informasi tentang kewirausahaan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perekonomian lainnya 	Ekonomi Pedesaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Promosi dan pemasaran produk-produk komoditi unggulan pedesaan ▪ Pengembangan produk-produk unggulan berbasis kekhasan desa ▪ Percepatan pembangunan di wilayah tertinggal dan wilayah terisolir ▪ Penguatan kelembagaan desa ▪ Peningkatan kualitas infrastruktur pedesaan

Sumber : Diolah dari Laporan EKPD 2010

2. Relevansi RPJMD Provinsi Gorontalo 2012-2017 dengan RPJMN 2010-2014

Sebagaimana diuraikan di atas visi pembangunan Provinsi Gorontalo 2012-2017 adalah: *"Terwujudnya Percepatan Pembangunan Berbagai Bidang serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berkeadilan di Provinsi Gorontalo"*. Visi ini memiliki relevansi dengan visi nasional yaitu: *Terwujudnya Indonesia yang sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan"*.

Untuk pelaksanaan 11 skala prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2010-2014, dijabarkan dalam tujuan pembangunan daerah sebagaimana uraian berikut:

Tujuan I : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, dengan sasaran sebagai berikut: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebesar 8 % dan Meningkatnya lapangan kerja (*prioritas pembangunan nasional 7 dan prioritas lain 1 dan 3*).

Tujuan II : Menyediakan Infrastruktur untuk percepatan pembangunan daerah, dengan sasaran Meningkatnya Infrastruktur daerah (*prioritas pembangunan nasional 6 dan 8*).

Tujuan III : Meningkatkan kualitas Pendidikan daerah, dengan sasaran Meningkatnya kualitas pendidikan (*prioritas pembangunan nasional 2*).

Tujuan IV : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan sasaran Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat (*prioritas pembangunan nasional 3*).

Tujuan V : Mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk kemakmuran masyarakat, dengan sasaran sebagai berikut :Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam, dan meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup (*prioritas pembangunan nasional 9*).

Tujuan VI : Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, dengan sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat (*prioritas pembangunan nasional 5, dan prioritas lainnya 1 dan 3*)

Tujuan VII : Memelihara keragaman Agama dan Budaya, dengan sasaran: meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama dan meningkatnya pelestarian budaya daerah (*prioritas pembangunan nasional 11*)

Tujuan VIII : Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, dengan sasaran meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak (*prioritas pembangunan nasional 3 dan prioritas pembangunan nasional lainnya 1*).

Tujuan IX : Mengembangkan *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan sasaran meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam pelayanan pada masyarakat (*prioritas pembangunan nasional 1 dan prioritas lainnya 2*).

Tujuan X : Pengentasan Kemiskinan, dengan sasaran berkurangnya persentase masyarakat miskin (*prioritas pembangunan nasional 4, 5 dan prioritas lainnya 1 dan 3*).

4.3 Relevansi RPJMD 2007-2012 dengan RPJMD 2012-2017 Provinsi Gorontalo

Berdasarkan uraian pada subbab 4.2 Visi Pembangunan Gorontalo 2007–2012, adalah: “*Gorontalo Provinsi Inovatif¹*”, dengan Misi “Membangun Gorontalo yang Mandiri, Produktif dan Religius”. Sedangkan visi 2012-2017 adalah: Terwujudnya Percepatan Pembangunan Berbagai Bidang serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berkeadilan di Provinsi Gorontalo”, dengan misi memfokuskan pada: Dengan misi peningkatan ekonomi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pengembangan SDA untuk kemakmuran rakyat, pengembangan nilai religius, dan sinergitas pemerintahan daerah

Secara tersirat visi dan misi RPJMD 2007-2012 dan RPJMD 2012-2017 memiliki relevansi karena keduanya bermakna peningkatan kemakmuran masyarakat Provinsi Gorontalo. Meskipun demikian visi dan misi RPJMD 2012-2017 lebih operasional dan dapat diukur. Selain itu RPJMD 2012-2017 lebih banyak memperhatikan skala prioritas

pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum dalam RPJMN 2010-2012, sedangkan RPJMD 2007-2012 skala prioritas tergambar pada pencapaian program kerja SKPD. Hal ini terjadi karena penetapan RPJMD 2007-2012 ditetapkan pada 3 tahun sebelum RPJMN sehingga tidak secara tepat dan akurat memiliki relevansi dengan RPJMN.

Secara operasional misi pertama RPJMD 2012-2017 menindaklanjuti agenda sektor unggulan Provinsi Gorontalo sebagaimana agenda dalam RPJMD 2002-2007 dan RPJMD 2007-2012, yaitu Konsep Agropolitan dimana jagung sebagai “Branding Gorontalo” yang diintegrasikan melalui Pengelolaan Peternakan Sapi, sekaligus meningkatkan manajemen Pertanian dan Perkebunan dengan pola *One Village One Production*, sehingga secara nyata dapat meningkatkan kemakmuran rakyat. Disamping itu hal yang didorong berupa membangkitkan industri dan usaha kecil menengah, koperasi, kepariwisataan dan kemudahan dalam akses permodalan diantaranya melalui Kredit Usaha Rakyat yang mudah serta tidak berbelit-belit.

4.4 Relevansi Arah, Kebijakan dan Strategi Pembangunan RPJMD 2012-2017 dengan RPJPD 2007-2025 Provinsi Gorontalo.

4.4.1 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Gorontalo dalam RPJPD 2007-2025

Berdasarkan dokumen RPJPD Provinsi Gorontalo 2007-2025, tujuan pembangunan jangka panjang Provinsi Gorontalo adalah terwujudnya “Gorontalo Maju dan Mandiri” di tahun 2025. Untuk mencapai cita-cita jangka panjang ini, tiga pilar utama yang harus dibangun, yaitu: 1) mewujudkan ketahanan ekonomi yang berkelanjutan; 2) mewujudkan sumberdaya manusia yang handal; dan 3) mewujudkan pemerintahan daerah yang amanah. Arah pembangunan ke tiga pilar dimaksud.

A. Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo yang Handal

1. Pertanian

Kegiatan pertanian dalam arti luas diarahkan pada kegiatan pertanian bernuansa agribisnis yang utuh dan menyeluruh dan memiliki keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif serta mempertahankan kelestarian plasma nutfah dan keseimbangan lingkungan. Disamping itu, pembangunan pertanian harus mampu berkontribusi terhadap peningkatan kualitas ketahanan pangan Propinsi Gorontalo.

2. Industri

Pembangunan dan pengembangan industri diarahkan pada industri yang mampu menciptakan dan meningkatkan nilai tambah, menunjang pertumbuhan ekonomi lokal dan memiliki perspektif pasar yang dalam penerapannya bersifat ramah lingkungan baik teknis maupun sosial.

3. Perdagangan dan Jasa

Pembangunan perdagangan dan jasa di arahkan pada penciptaan Provinsi Gorontalo sebagai salah satu simpul perdagangan di Sulawesi dan Kawasan Indonesia Bagian Timur yang didukung oleh infrastruktur fisik dan aturan yang berkualitas dan relevan serta sistim informasi dan komunikasi yang handal dan menggugah inspirasi dalam menghadapi perdagangan bebas.

4. Pariwisata

Arah pembangunan pariwisata diarahkan pada penguatan ekonomi regional dengan tidak meninggalkan nilai tradisi dan budaya daerah serta tidak bertentangan dengan norma yang berlaku pada masyarakat.

5. Pertambangan

Pembangunan pertambangan diarahkan pada usaha pertambangan yang menunjang ekonomi lokal, padat teknologi dan ramah lingkungan.

6. Investasi

Pengembangan investasi diarahkan pada investasi yang mendorong sektor riil dengan memperhatikan sektor publik disertai dengan jaminan kepastian berusaha serta tetap memperhatikan nilai-nilai luhur budaya dan agama.

7. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Pembangunan kependudukan diarahkan pada peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak dan terciptanya keluarga sejahtera. Sedangkan pembangunan ketenaga-kerjaan diarahkan pada peningkatan daya saing dan produktivitas tenaga kerja, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja dengan tetap mengindahkan prinsip-prinsip non-diskriminasi. Pada sisi permintaan tenaga kerja, pembangunan diarahkan pada penyediaan informasi pasar tenaga kerja.

8. Koperasi dan UKM

Pengembangan koperasi dan UKM diarahkan pada penciptaan daya saing Koperasi dan UKM sehingga mampu berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

9. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan di Propinsi Gorontalo diarahkan pada usaha-usaha penciptaan nilai tambah dan peningkatan manfaat terhadap perekonomian, peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kualitas pemerintahan, serta pencegahan degradasi kualitas lingkungan.

10. Tata Ruang

Pengembangan tata ruang diarahkan ke penataan ruang yang mampu mempersatukan secara optimal antara kebutuhan dan

daya dukung ruang sehingga keserasian, kelestarian dan keseimbangan lingkungan tetap terjaga.

11. Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur (fisik dan non-fisik) diarahkan pada infrastruktur yang mampu memfasilitasi peningkatan inovasi, daya saing dan ketahanan ekonomi serta peningkatan kualitas layanan.

B. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Gorontalo yang Handal

Arah pengembangan sumberdaya manusia di Propinsi Gorontalo adalah:

1. Pendidikan

Pengembangan pendidikan diarahkan untuk peningkatan akses terhadap sumber-sumber belajar terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu, peningkatan kualitas dan relevansi proses pelaksanaan pendidikan sesuai dengan tuntutan *stakeholder*, dan peningkatan kualitas infrastruktur pendukung serta manajemen internal institusi-institusi pendidikan dan pengelola sumber-sumber belajar lainnya. Proses pendidikan yang dijalankan harus mampu membangkitkan dan mengembangkan kapasitas, bakat dan kreatifitas peserta didik pada semua jenjang dan jenis pendidikan termasuk pendidikan non-formal dan pendidikan luar biasa. Proses pendidikan dimaksud tetap harus menjunjung tinggi nilai moral dan etika.

2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas dan non-diskriminatif mulai dari aspek-aspek kesehatan dasar sampai kepada informasi dan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyakit. Aspek ini juga diarahkan pada peningkatan kesadaran kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat.

3. Inovasi

Pengembangan inovasi diarahkan pada peningkatan kapasitas pemerintah dan swasta termasuk lembaga pendidikan dalam memfasilitasi masyarakat mengembangkan inovasi-inovasi kreatif yang mampu memberikan nilai tambah baik yang sifatnya terukur (*tangible*) maupun yang tidak terukur (*intangibile*) dalam peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

4. Keagamaan

Pembangunan keagamaan diarahkan pada peningkatan kesadaran dan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai dan ajaran agama setiap individu sehingga masing-masing individu mampu memaknai kehidupannya terutama dalam menghidupkan khasanah nilai-nilai luhur agama.

5. Sosial Budaya

Pembangunan sosial budaya diarahkan pada eksplorasi, peningkatan kualitas pemahaman dan pengejawantahan nilai-nilai sosial kemasyarakatan berikut aspek-aspek budaya sehingga memperkuat modal sosial dan identitas diri masyarakat Propinsi Gorontalo ditengah-tengah lingkungan strategisnya yang dinamis.

6. Jaminan Perlindungan sosial

Pembangunan pada aspek ini diarahkan pada penguatan sendi-sendi kehidupan masyarakat sehingga masalah-masalah sosial dapat dikelola agar kualitas tatanan masyarakat tetap terjaga. Penguatan dimaksud termasuk didalamnya usaha-usaha peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat sebagai bagian dari warga negara Indonesia, dan penguatan kelembagaan masyarakat sehingga mampu memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan Propinsi Gorontalo.

C. Mewujudkan Pemerintahan Daerah Gorontalo yang Amanah

Pengelolaan pemerintahan diarahkan sebagai berikut:

1. **Pelayanan Publik**
Diarahkan untuk menggerakkan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan prima dan berkualitas yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
2. **Pengembangan Kualitas Aparatur**
Pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif diarahkan pada pembentukan dan peningkatan kualitas kesadaran dan integritas untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
3. **Kapasitas Perencanaan Daerah**
Perencanaan daerah diarahkan pada peningkatan kapasitas, kualitas dan sensitifitas perencana dalam membangun strategi dan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan memiliki relevansi yang tinggi dengan kebutuhan pembangunan.
4. **Keuangan Daerah**
Pembangunan keuangan daerah diarahkan pada terciptanya perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektifitas. Inovasi harus terus dikembangkan untuk mengidentifikasi dan menciptakan sumber-sumber anggaran dan sumber sumber keuangan daerah yang sejalan dengan usaha-usaha peningkatan ketahanan ekonomi, peningkatan kualitas dan intensitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.
5. **Infrastruktur Pemerintahan**

Pengembangan infrastruktur pemerintahan diarahkan pada peningkatan kapasitas, kualitas dan pemanfaatan sistem informasi dan komunikasi yang didukung dengan teknologi yang relevan serta sistem data yang handal dan mutakhir.

6. Kemitraan Pembangunan

Kemitraan pembangunan diarahkan pada peningkatan intensitas dan kualitas kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan pengambilan keputusan kebijakan publik, termasuk didalamnya peningkatan keterkaitan ekonomi Gorontalo dengan jejaring ekonomi Teluk Tomini, *Celebes Incorporated*, serta jejaring ekonomi nasional dan internasional. Penguatan kemitraan ini harus dapat menjamin bahwa prinsip-prinsip non-diskriminasi dan keseimbangan pemanfaatan ruang dan sumberdaya alam tetap terjaga.

7. Hukum dan Perundang-undangan

Pembangunan hukum dan perundang-undangan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan hukum dan perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta memperhatikan perlindungan anak dan perempuan, serta diarahkan untuk peningkatan kualitas kesadaran dan budaya hukum masyarakat dalam rangka penciptaan stabilitas keamanan dan ketertiban.

8. Koordinasi Pemerintahan

Koordinasi pemerintahan diarahkan untuk menciptakan keserasian dan keselarasan hubungan antar wilayah, lembaga pemerintahan dan masyarakat sehingga pelayanan publik menjadi lebih efisien dan efektif.

9. Keamanan dan Ketertiban

Pembangunan keamanan dan ketertiban diarahkan pada upaya untuk mendorong kemampuan aparaturnya pemerintahan dan masyarakat untuk mengantisipasi dan mengelola keamanan dan ketertiban di daerah.

10. Sosial dan Politik

Pembangunan sosial dan politik diarahkan pada peningkatan kesadaran sosial dan politik demi terwujudnya masyarakat yang harmonis dan dinamis.

11. Budaya dan adat Istiadat

Pengembangan budaya dan adat istiadat berpedoman pada falsafah Gorontalo, yakni “Adat Bersendikan Syara, Syara Bersendikan Kitabullah”.

4.4.2 Arah, Kebijakan dan Strategi Pembangunan Dalam RPJMD Provinsi Gorontalo 2012-2017

RPJMD Provinsi Gorontalo 2012-2017 memiliki 5 misi, dengan 13 sasaran pembangunan, 22 strategi serta 68 butir kebijakan. Secara rinci hal ini tersaji pada Tabel 4.6.

4.4.3 Analisis Relevansi

Uraian di atas menyebutkan bahwa tujuan pembangunan jangka panjang Provinsi Gorontalo adalah terwujudnya “Gorontalo Maju dan Mandiri” di tahun 2025, melalui tiga pilar utama yang harus dibangun, yaitu: 1) mewujudkan ketahanan ekonomi yang berkelanjutan; 2) mewujudkan sumberdaya manusia yang handal; dan 3) mewujudkan pemerintahan daerah yang amanah. Arah pembangunan ke tiga pilar dimaksud yang menjadi kompas dalam seluruh aktivitas pembangunan di Provinsi dijabarkan pada berbagai sektor, yaitu:

Pilar Pertama mewujudkan ketahanan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur 11 sektor, yaitu: Pertanian, industri, perdagangan dan jasa, pariwisata, pertambangan, investasi, kependudukan dan ketenagakerjaan, koperasi dan UKM, penelitian dan pengembangan, tata ruang dan infrastruktur.

Pilar Kedua, mewujudkan sumberdaya manusia yang handal, mengatur 7 sektor, yaitu: Pendidikan, kesehatan, inovasi, keagamaan, sosial budaya, dan jaminan perlindungan sosial.

Pilar ketiga, mewujudkan pemerintahan daerah yang amanah, mengatur 11 sektor, yaitu: Pelayanan Publik, Pengembangan Kualitas Aparatur, Kapasitas Perencanaan Daerah, Keuangan Daerah, Infrastruktur Pemerintahan, Kemitraan Pembangunan, Hukum dan Perundang-undangan, Koordinasi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Politik, Budaya dan adat Istiadat

Arah kebijakan dalam RPJMD 2012-2017 merupakan tindakan yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misinya dimana operasionalnya didasarkan pada pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan serta strategi yang diambil dalam mencapai sasaran dimaksud.

Relevansi antara arah pembangunan yang terdapat dalam RPJPD 2009-2025 dengan arah kebijakan dalam RPJMD 2012-2017, adalah dalam mencapai sasaran pembangunan pada periode 2012-2017, maka program setiap sektor pembangunan yang dijalankan oleh masing-masing SKPD terkait harus mengacu pada arah pembangunan yang ditetapkan pada RPJPD 2007-2025. Hal ini dimaksudkan agar visi pembangunan Provinsi Gorontalo 2025 yaitu "Gorontalo Maju dan Mandiri" dapat diwujudkan.

Tabel 4.6 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Gorontalo 2012-2017

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	2	3	4
Misi I Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Laju Investasi, : Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Potensi Unggulan Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat.				
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebesar 8 %	1. Meningkatkan investasi	- Mengupayakan iklim investasi yang kondusif
		2. Meningkatnya lapangan kerja	2. Menurunkan angka pengangguran terbuka	- Mengupayakan peningkatan lapangan kerja baru
			3. Perdagangan Antar Pulau	- Mendorong peningkatan perdagangan barang dan jasa antar pulau
			4. Menekan Laju Inflasi	- Mengupayakan stabilisasi harga dan distribusi barang dan jasa
			5. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah	- Mendorong peningkatan APBD
			6. Mengembangkan Pariwisata Daerah	- Mengupayakan Pengembangan Pariwisata Daerah
			7. Mengembangkan IKM, UMKM dan Koperasi	- Mendorong berkembangnya IKM, UMKM dan Koperasi

			8. Peningkatan investasi baik PMDN, PMA dan Swasta murni	- Mengupayakan kemudahan investasi
			9. Peningkatan Keterampilan dan Produktivitas Tenaga kerja	- Mengembangkan teknologi informasi untuk memperkenalkan potensi daerah secara nasional maupun internasional.
				- Mendorong kerjasama yang konkrit dalam meningkatkan investasi.
				- Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang meningkatkan minat investasi.
				- Meningkatkan koordinasi dalam pengembangan investasi baik ditingkat regional dan nasional.
				- Mendorong peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja.
2	Menyediakan infrastruktur untuk percepatan pembangunan daerah	Meningkatnya Infrastruktur Daerah	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur darat, laut dan udara	- Membangun Jalan, Jembatan, Irigasi, Waduk, Pelabuhan, Bandara dan Terminal
			2. Meningkatkan Pengembangan Kawasan Strategis	- Mengupayakan pengembangan wilayah dan kawasan strategis.
				- Membangun Bandara Internasional Gorontalo
				- Mendorong pembukaan kawasan pemukiman baru
Misi II Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendekatan kesesuaian keahlian serta pemenuhan mutu : kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan				
1.	Meningkatkan kualitas Pendidikan daerah	Meningkatnya kualitas pendidikan	Peningkatan kualitas pendidikan	- Mengupayakan pendidikan gratis

				- Memperluas akses pendidikan
				- Mendorong peningkatan mutu Pendidikan
				- Mendorong peningkatan pendidikan luar sekolah (pendidikan informal)
				- Mengembangkan pendidikan berbasis kawasan.
2	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat	- Mendorong peningkatan layanan kesehatan dengan jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin (SEMESTA)
				- Menyiapkan sarana dan prasarana kesehatan
				- Mengupayakan peningkatan kapasitas SDM kesehatan
				- Mengembangkan manajemen sistem layanan kesehatan
				- Mengembangkan Pola Hidup Bersih dan Sehat
Misi III Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi sumberdaya kelautan, pertanian, peternakan, kehutanan, danau limboto dan potensi lingkungan lainnya yang lebih baik, saling terintegrasi serta lestari demi kepentingan kemakmuran rakyat.				
1.	Mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk kemakmuran masyarakat	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam	Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam	- Mendorong peningkatan produksi dan produktifitas perikanan dan kelautan, Pertanian, Peternakan & Perkebunan dan Kehutanan
				- Mendorong Peningkatan Pengelolaan Energi
				- Mengupayakan terinformasinya varitas benih unggulan sekaligus melakukan diseminasi inovasi teknologi.
				- Meningkatkan kapasitas SDM pada sektor pertanian, perikanan dan Kehutanan.
		Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup	Penikngkatan pengelolaan lingkungan hidup	- Melakukan upaya untuk mengurangi pengrusakan kawasan hutan.

			Peningkatan penyediaan Air Bersih dan Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> - Mengupayakan penyelamatan danau limboto. - Menyediakan manajemen pengelolaan LH - Mendorong partisipasi lembaga dan masyarakat dalam pengelolaan dan pengendalian dampak LH.
				<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup - Mendesain regulasi yang ditujukan untuk mengurangi dampak lingkungan. - Melakukan kajian terhadap kualitas air, udara dan tanah serta rawan bencana. - Mendorong Ketersediaan Air Bersih dan Sanitasi
Misi IV Mengembangkan nilai-nilai religi, dalam kehidupan beragama yang rukun penuh kesejukan sekaligus memelihara keragaman budaya. Serta memperkuat peran pemberdayaan perempuan, perlindungan terhadap anak, termasuk issue kesetaraan gender dalam pembangunan				
1.	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong Pembangunan Kawasan Adat Terpencil (KAT) - Memperhatikan kualitas hidup lansia
				<ul style="list-style-type: none"> - Memperhatikan kualitas hidup fakir miskin dan anak-anak terlantar
2.	Memelihara keragaman Agama dan Budaya	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Umat Beragama	Meningkatkan kerukunan antar umat beragama.	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong kerukunan antar umat beragama, etnik, maupun golongan untuk meningkatkan rasa saling percaya dan hubungan yang harmonis di antara kelompok-kelompok masyarakat.

				<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan peningkatan peran kelembagaan agama sebagai institusi yang mendorong pengembangan iman dan keselarasan hidup antar umat beragama.
		Meningkatnya pelestarian budaya daerah	Meningkatkan pelestarian nilai-nilai budaya daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pagelaran-pagelaran seni budaya daerah, mengembangkan sanggar-sanggar seni serta komunitas adat untuk melestarikan budaya lokal.
				<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan dan mempertahankan tradisi dan budaya religi.
3.	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> - Mengupayakan dan mendorong peningkatan pemberdayaan ekonomi khususnya bagi perempuan.
				<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat peran lembaga perlindungan perempuan dan anak.
				<ul style="list-style-type: none"> - Mengupayakan peningkatan pengarusutamaan gender.
				<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong peran aktif perempuan dalam pembangunan daerah.
<p>Misi V <i>Menciptakan sinergitas diantara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota di Gorontalo dalam kaidah otonomi daerah sekaligus untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, menurunkan angka kemiskinan serta menjalankan sistem tata pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi.</i></p>				
1.	Mengembangkan Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dalam pelayanan pada masyarakat	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. - Mendorong peningkatan pengelolaan keuangan daerah.
				<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara termasuk perlindungan masyarakat.
				<ul style="list-style-type: none"> - Mengefektifkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan.

				- Mengefektif koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
				- Mengupayakan peningkatan kualitas aparatur daerah.
				- Mendorong dilaksanakannya reformasi birokrasi.
				- Mengupayakan efektivitas pengelolaan asset daerah.
				- Mendorong efektivitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
				- Memperkuat tugas-tugas pemerintahan umum dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah.
				- Melakukan penataan organisasi perangkat daerah.
				- Mendorong peningkatan penerapan Produk hukum dan perundang-undangan daerah.
				- Mengembangkan Sistem Komunikasi dan Informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
				- Mengupayakan tersedianya bahan bacaan yang berkualitas bagi masyarakat
				- Mendorong dilakukannya riset dan kajian yang berguna bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
2.	Pengentasan Kemiskinan	Berkurangnya persentase masyarakat miskin	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin	- Mengupayakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin
				- Mendorong peningkatan ekonomi masyarakat miskin
				- Membuka akses produksi bagi masyarakat miskin

Sumber: Dokumen RPJMD 2012-2017

4.5 Relevansi RPJMD 2012-2017 Provinsi Gorontalo dengan MP3EI 2011-2025

4.5.1 Fokus Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

Tujuan awal dilakukannya MP3EI adalah untuk mencapai aspirasi Indonesia 2025, yaitu menjadi negara maju dan sejahtera dengan PDB sekitar USD 4,3 Triliun dan menjadi negara dengan PDB terbesar ke-9 di dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut, sekitar 82% atau USD 3,5 Triliun akan ditargetkan sebagai kontribusi PDB dari koridor ekonomi sebagai bagian dari transformasi ekonomi.

Sebagai dokumen kerja, MP3EI berisikan arahan pengembangan kegiatan ekonomi utama yang sudah lebih spesifik, lengkap dengan kebutuhan infrastruktur dan rekomendasi perubahan/revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu dilakukan maupun pemberlakuan peraturan-perundangan baru yang diperlukan untuk mendorong percepatan dan perluasan investasi. Selanjutnya MP3EI menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. MP3EI bukan dimaksudkan untuk mengganti dokumen perencanaan pembangunan yang telah ada seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (UU No. 17 Tahun 2007) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, namun menjadi dokumen yang terintegrasi dan komplementer yang penting serta khusus untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. MP3EI juga dirumuskan dengan memperhatikan Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) karena merupakan komitmen nasional yang berkenaan dengan perubahan iklim global.

MP3EI diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru. Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional. Setiap wilayah mengembangkan produk yang menjadi keunggulannya. Tujuan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut adalah untuk memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah serta memperbaiki

ketimpangan spasial pembangunan ekonomi Indonesia.

Langkah-langkah terobosan yang tertuang di dalam strategi dan kebijakan MP3EI dirumuskan dengan memperhatikan sejumlah prasyarat yang diperlukan. Selain itu juga dikembangkan strategi yang terdiri atas 3 (tiga) pilar utama berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, yaitu strategi peningkatan potensi wilayah melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di dalam koridor ekonomi, strategi memperkuat konektivitas nasional, serta strategi meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dan IPTEK. Prasyarat serta berbagai strategi pengembangan tersebut akan sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan MP3EI

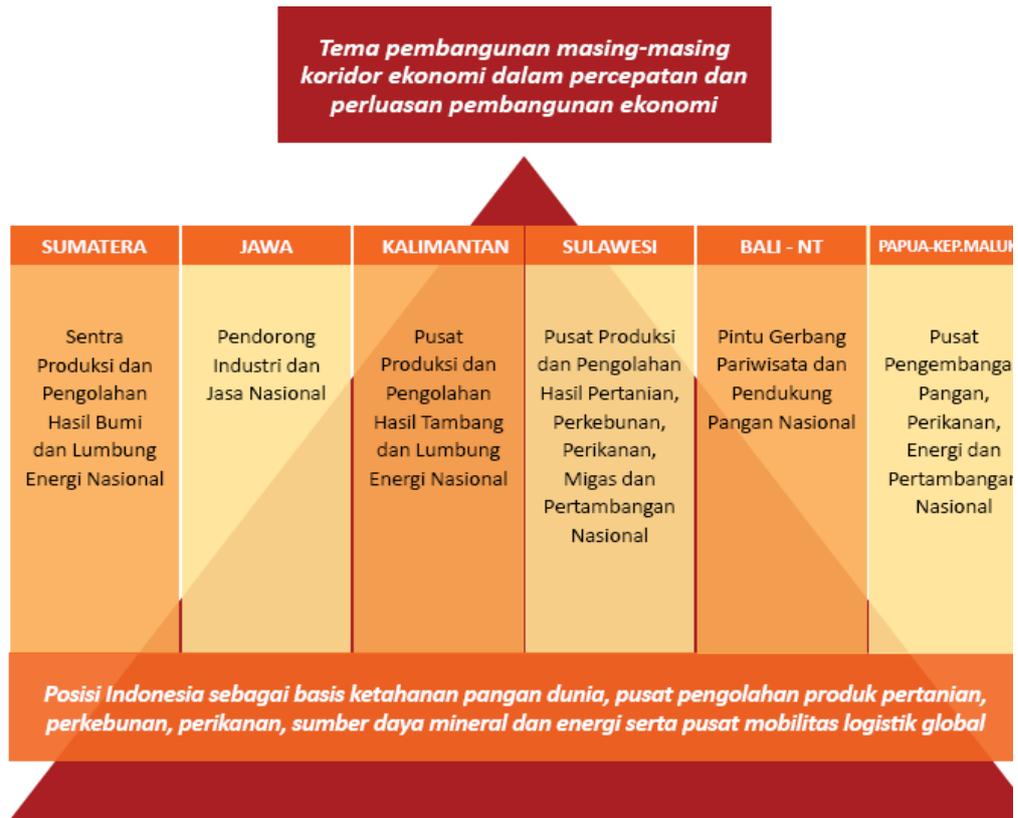
Berdasarkan ketiga strategi yang telah ditetapkan, disusun rencana pembangunan 6 koridor ekonomi yang *multiplier*-nya meliputi seluruh wilayah tanah air. Pada masing-masing koridor ekonomi akan difokuskan pada pengembangan sejumlah kegiatan ekonomi utama sesuai dengan keunggulan masing-masing wilayahnya. Sejumlah indikasi investasi sampai dengan 2014, termasuk infrastruktur utama, diidentifikasi berdasarkan proses interaksi dengan seluruh pemangku kepentingan. Tema pembangunan masing-masing koridor ekonomi dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi sebagai berikut:

- Koridor Ekonomi Sumatera memiliki tema pembangunan sebagai “Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional”;
- Koridor Ekonomi Jawa memiliki tema pembangunan sebagai “Pendorong Industri dan Jasa Nasional”;
- Koridor Ekonomi Kalimantan memiliki tema pembangunan sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi Nasional”;
- Koridor Ekonomi Sulawesi memiliki tema pembangunan sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas dan Pertambangan Nasional”;
- Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara memiliki tema pembangunan sebagai “Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional”;

- Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku memiliki tema pembangunan sebagai “Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional”.

Koridor Ekonomi Sulawesi mempunyai tema Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Pertambangan Nikel Nasional. Koridor ini diharapkan menjadi garis depan ekonomi nasional terhadap pasar Asia Timur, Australia, dan Amerika. Koridor Ekonomi Sulawesi memiliki potensi tinggi di bidang ekonomi dan sosial dengan kegiatan-kegiatan unggulannya. Meskipun demikian, secara umum terdapat beberapa hal yang harus dibenahi di Koridor Ekonomi Sulawesi:

- Rendahnya nilai PDRB per kapita di Sulawesi dibandingkan dengan pulau lain di Indonesia;
- Kegiatan ekonomi utama pertanian, sebagai kontributor PDRB terbesar (30 persen), tumbuh dengan lambat padahal kegiatan ekonomi utama ini menyerap sekitar 50 persen tenaga kerja;
- Investasi di Sulawesi berasal dari dalam dan luar negeri relatif tertinggal dibandingkan daerah lain;
- Infrastruktur perekonomian dan sosial seperti jalan, listrik, air, dan kesehatan kurang tersedia dan belum memadai. Pembangunan Koridor Ekonomi Sulawesi berfokus pada kegiatan-kegiatan ekonomi utama pertanian pangan, kakao, perikanan dan nikel. Selain itu, kegiatan ekonomi utama minyak dan gas bumi dapat dikembangkan yang potensial untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di koridor ini.



Gambar 4.1 Tema Pembangunan Koridor Ekonomi dalam MP3EI

4.5.2 Analisis Relevansi

Provinsi Gorontalo merupakan salah satu provinsi yang berada di pulau Sulawesi, sehingga termasuk dalam koridor ekonomi Sulawesi. Sebagaimana dijelaskan di atas Koridor Ekonomi Sulawesi memiliki tema pembangunan sebagai "Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas dan Pertambangan Nasional.

Relevansi antara RPJMD Provinsi Gorontalo 2012-2017 dengan MP3EI dapat dilihat dari tema koridor ekonomi Sulawesi dengan Misi 3 dalam RPJMD 2012-2017, yaitu: Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi sumberdaya kelautan, pertanian, peternakan, kehutanan, danau limboto dan potensi lingkungan lainnya yang lebih baik, saling terintegrasi serta lestari demi kepentingan kemakmuran rakyat. Misi ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas terhadap potensi sumber daya alam Kelautan, Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Danau Limboto termasuk sumber daya pesisir yang termasuk dalam satu kesatuan wilayah Daerah Aliran Sungai, yang dikelola secara terpadu dan

berkelanjutan tanpa merusak daya dukung lingkungan alamnya. Peningkatan produktivitas sektor-sektor tersebut diharapkan akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai misi ini, arah kebijakan RPJMD 2012-2017 yang ditempuh antara lain: 1) Mendorong peningkatan produksi dan produktifitas perikanan dan kelautan, Pertanian, Peternakan dan Perkebunan dan Kehutanan, dan Mengupayakan terinformasinya varitas benih unggulan sekaligus melakukan diseminasi inovasi teknologi

Berdasarkan misi dan penjelasannya serta arah kebijakan maka dapat disimpulkan terdapat relevansi antara Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia dengan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2012-2017.

4.6 Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Berdasarkan Efektivitas Pelaksanaan Prioritas Pembangunan RPJMN 2010-2014

RPJMN 2010-2014 memiliki 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya, yaitu: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; Pendidikan; Kesehatan; Penanggulangan Kemiskinan; Ketahanan Pangan; Infrastruktur; Iklim Investasi dan Iklim Usaha; Energi; Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik; Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi. 3 prioritas lainnya, yaitu: Kesejahteraan Rakyat; Politik, Hukum, dan Keamanan serta Perekonomian.

Pada umumnya indikator prioritas nasional di Provinsi Gorontalo efektif, hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatannya selama tiga tahun analisis. Hal ini mengindikasikan bahwa dari sisi pelaksanaan program prioritas nasional maka kinerja pembangunan daerah Provinsi Gorontalo adalah baik. Meskipun demikian terdapat beberapa indikator yang stagnan bahkan ada yang mengalami penurunan. Deskripsi dan analisis setiap indikator prioritas nasional ini secara rinci diuraikan di bawah ini.

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;

Indikator yang dijadikan untuk mengevaluasi pelaksanaan Reformasi birokrasi dan tata kelola, kasus korupsi, peraturan satu atap, pelaporan keuangan, pelaksanaan e-procurement, perda transparansi, dan investasi. Capaian indikator pelaksanaan birokrasi di Provinsi Gorontalo tahun 2009-2011 tersaji pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Capaian Indikator Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Indikator	2009	2010	2011
Persentase kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang ditangani lebih lanjut oleh kejaksaan	9	65,85	111,53
Persentase kab/ kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap	57,00	71,00	86,00
Persentase kab/kota yang memiliki pelaporan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	14,00	14,00	14,00
Persentase kab/kota yang telah memiliki <i>e-procurement</i>	14,00	14,00	14,00
Persentase kab/kota yang telah memiliki Perda Transparansi	44,00	44,00	44,00
Persentase peningkatan investasi PMA	-	24,66	21,84
Persentase peningkatan investasi PMDN	-	56,84	

Sumber: Laporan EKPD 2009, 2010 dan 2011

- *Pencegahan Korupsi*

Pemerintah Daerah selama ini terus melakukan upaya dalam memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Hal ini terlihat antara lain dari komitmen pemerintah untuk menekan angka korupsi yang terjadi di daerah. Selain upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah masyarakat juga terus melakukan pengawasan dengan munculnya berbagai komunitas anti korupsi yang turut mengawal dan mengontrol jalannya pelayanan publik. Selain itu di dunia akademik lembaga pendidikan tinggi telah menerapkan kurikulum anti korupsi, seperti halnya pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo

serta pada beberapa fakultas yang ada di Universitas Gorontalo. Pada tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, kurikulum pemberantasan korupsi telah masuk pada taraf sosialisasi, sedangkan untuk tingkat Sekolah Menengah Umum telah dilakukan MOU dengan Kejaksaan, seperti halnya yang dilakukan oleh SMU Negeri 1 Gorontalo.

Pengawasan yang diberikan oleh masyarakat serta adanya upaya pencegahan korupsi secara dini melalui kurikulum pada dunia pendidikan merupakan cerminan dari pemerintah daerah untuk mencegah korupsi sekaligus sebagai upaya untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Faktor yang diidentifikasi mempengaruhi perbuatan korupsi adalah kesadaran hukum dan kepastian hukum pelaku tindak pidana korupsi yang bersifat variatif, implementasi berbagai produk hukum yang telah dihasilkan perlu lebih ditingkatkan untuk menjamin tumbuhnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah dengan mewujudkan kepastian hukum bagi semuanya, tingkat kepedulian *stakeholder* di Gorontalo terhadap produk hukum masih perlu ditingkatkan agar keberadaan hukum benar-benar menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan/pengayom masyarakat. Selain itu faktor yang penting adalah komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan pemerintah bersih yang bebas korupsi. Penyelesaian jumlah kasus korupsi yang dapat diselesaikan sangat tergantung pula dari bukti yang diperoleh pihak berwenang. Pada tahun 2010 terdapat 41 kasus korupsi yang sampai pada tahap penyidikan dan 27 kasus sampai pada tahap penuntutan (65,85%), dengan kerugian negara sebanyak 2,054 milyar rupiah. Tahun 2011 jumlah kasus korupsi yang masuk penuntutan 29 dari 26 kasus yang masuk pada tahapan penyidikan (111,53%). Kenaikkan ini disebabkan terdapat kasus pada tahun sebelumnya yang penuntutannya nanti dilakukan pada tahun 2011 ini.

- Persentase kab/ kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap,

Pola pelayanan publik yang dilakukan secara terpadu pada suatu tempat oleh beberapa instansi pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Provinsi Gorontalo sampai saat ini terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota. Pelayanan satu atap diberikan sejak tahun 2005 yang dimulai dari Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo. Pada tahun 2010 jumlah kabupaten/kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap berjumlah 71%, tahun 2011 menjadi 86% dan sampai September 2012 ini jumlah kabupaten/kota yang memiliki pelayanan satu atap adalah 86%.

- Persentase provinsi dan kab/kota yang memiliki pelaporan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Provinsi selang tahun 2009-2010 hanya dicapai oleh 1 kabupaten atau 14%. Meskipun demikian wilayah lainnya pada tahun 2010 memiliki predikat penilaian wajar dengan pengecualian (WDP). Pemerintah Provinsi Gorontalo sesungguhnya memiliki komitmen yang kuat dalam pengelolaan keuangan ini. Hal ini dibuktikan Provinsi Gorontalo telah menjadi *pilot project* penerapan neraca keuangan daerah sejak tahun 2002 (setahun sejak terbentuk Provinsi Gorontalo yakni tahun 2001). Kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mendapatkan penilaian WTP salah satunya disebabkan penerjemahan aturan pengelolaan keuangan daerah yang selalu berubah yang keliru dalam pelaksanaannya di daerah.

- Persentase provinsi dan kab/kota yang telah melaksanakan proses pelelangan menggunakan *e-procurement* sebanyak minimal 40%,
E-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Penerapan *e-procurement* terus dilakukan persiapan pada beberapa wilayah. Selama ini kebijakan ini terkendala oleh hal bersifat teknis seperti kesiapan Informasi Teknologi serta SDM penunjang. Meskipun

demikian pada tingkat provinsi hal ini sudah dilaksanakan. Selain penerapan *e-procurement*, suatu pemerintahan masuk kategori *Good governance* manakala pemerintahan tersebut sudah menerapkan prinsip-prinsip transparansi. Sampai tahun 2011 wilayah yang telah menerapkan Perda transparansi adalah 44%, sisanya masih dalam tahap persiapan pengesahan karena termasuk daerah yang belum lama dimekarkan.

- **Persentase kab/kota yang telah memiliki Perda Transparansi**
Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Transparansi merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan *Good Governance*. Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan dan keputusan di lingkungan organisasi dan pemerintahan, maka keadilan (*fairness*) dapat ditumbuhkan. Suatu pemerintahan masuk kategori *Good Governance* manakala pemerintahan tersebut sudah menerapkan prinsip-prinsip transparansi. Hal ini dimungkinkan karena prinsip-prinsip *Good governance* adalah mencakup: Transparansi, Integritas, Akuntabilitas, Tanggung jawab dan Partisipasi. Wilayah yang telah menjalankan Perda transparansi di Provinsi Gorontalo sampai tahun 2011 adalah: Kota Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Provinsi Gorontalo.

- **Pendidikan;**

Indikator yang dijadikan untuk mengevaluasi pelaksanaan pendidikan adalah: lama sekolah, angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, kelulusan ujian nasional, angka melek huruf. Capaian indikator pendidikan di Provinsi Gorontalo tahun 2009-2011 tersaji pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Capaian Indikator Pendidikan Tahun 2009-2011

Indikator	2009	2010	2011
Rata-rata Lama Sekolah	7,20	7,10	7,10
<i>Angka Partisipasi Murni :</i>			
SD/MI	90,40	97,84	98,27
SMP/MTs	-	71,73	76,28
<i>Angka Partisipasi Kasar</i>	-		
SD/MI :		109,15	104,57
SMP/MTs :	117,56	73,51	84,55
Persentase kelulusan ujian nasional SD	-	91,71	94,45
Persentase kelulusan ujian nasional SMP	-	98,84	95,36
Persentase kelulusan ujian nasional SMA	-	99,43	95,36
Angka melek aksara 15 tahun ke atas	-	88.029	91.029

Sumber: Laporan EKPD 2009, 2010 dan 2011

- Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah lama sekolah (tahun) penduduk usia 10 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah Provinsi Gorontalo pada tahun 2010 dan 2011 ditargetkan menjadi 7,10 tahun. Rata-rata lama sekolah berhubungan dengan beberapa faktor antara lain: Jumlah siswa penerima BOS, Rasio siswa-guru dan ruang kelas. Sampai tahun 2011/2012 jumlah siswa penerima Bos untuk tingkat SD/MI adalah 144.163 siswa sedangkan tingkat SMP/MTs berjumlah 44.743 siswa. Rasio siswa-guru tingkat SD/MI 13, SMP/MTs rasionya 10 dan SMA/SMK/MA rasionya 12. Rasio siswa dan sekolah untuk SD/MI 155. SMP/MTs rasionya 152 dan SMA/MA 439, SMK Rasionya 256. Untuk rasio siswa-kelas tingkat SD/MI adalah 24, SMP/MTs rasionya 26 dan SMU/MA dan SMK masing-masing rasionya 61 dan 34.

- Angka melek aksara 15 tahun ke atas

Angka melek aksara di Provinsi Gorontalo dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 angka capaiannya 88,029%, tahun 2011 mencapai 91,029% dan tahun 2012 mencapai 94,529. Program implementatif yang dapat meningkatkan angka melek

aksara adalah program Paket Pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2011/2011 persentase peserta didik Paket terhadap putus sekolah menurut jenjang masing-masing Paket A 250,55%, Paket B, 737,47% dan Paket C persentasenya 818,75%. Faktor lain yang turut mengangkat angka melek aksara adalah adanya keikutsertaan perguruan tinggi seperti halnya Universitas Negeri Gorontalo dalam program pemberantasan buta aksara turut mendorong peningkatan angka ini. Universitas Negeri Gorontalo melalui program pengabdian masyarakat yaitu Kuliah Kerja Sibermas (KKS) bersama masyarakat memberantas buta aksara ini terutama di desa-desa yang menjadi lokasi KKS. Faktor lain yang cukup berperan peningkatan kinerja pendidikan adalah disusunnya Aksi daerah MDG 2015 yang menjadi pegangan dalam peningkatan indikator MDG yang didalamnya termasuk bidang pendidikan.

- Persentase kelulusan ujian nasional SD/MI

Untuk persentase kelulusan ujian nasional SD di Provinsi Gorontalo dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Tahun 2010, angka kelulusan UN mencapai 91,71 %, tahun 2011 dan tahun 2012 masing-masing mencapai 94,71% dan 100%. Peningkatan jumlah siswa yang lulus UN ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: meningkatnya profesionalisme dosen yang dilihat dari meningkatnya jumlah guru yang tersertifikasi, dimana tahun 2011/2012 jumlah guru yang tersertifikasi adalah 23,3%. Selain itu intensitas dan kuantitas guru dalam mengikuti pelatihan mata pelajaran merupakan faktor yang turut berperan dalam mengangkat tingkat kelulusan UN, dimana terdapat 1.872 orang guru yang mengikuti pelatihan mata pelajaran. Dukungan dana juga merupakan faktor yang mendorong peningkatan jumlah siswa lulus UN. Pada tahun 2011/2012 jumlah dana untuk Sekolah Dasar sebesar 150,244 milyar rupiah.

- Persentase kelulusan ujian nasional SMP

Dalam rentang tahun 2009-2011, kelulusan ujian nasional SMP mengalami fluktuatif. Tahun 2010 angka kelulusan mencapai 98,84%,

tahun 2011 turun menjadi 95,36%. Faktor yang mendorong peningkatan capaian siswa lulus UN tingkat SMP dapat dilihat pula dari peningkatan profesionalisme guru yang tergambar dari jumlah guru yang tersertifikasi sampai tahun 2011/2012 adalah 39,72%; jumlah guru yang mengikuti pelatihan mata pelajaran berjumlah 1.630 orang; dan jumlah alokasi anggaran sebesar 62,54 milyar rupiah.

- Persentase kelulusan ujian nasional SMA

Untuk ujian nasional tingkat SMA Provinsi Gorontalo angka kelulusannya mengalami fluktuasi, dimana tahun 2010 mencapai 99,43%, tahun 2011 mencapai 95,36% dan tahun 2012 mencapai 99,33%. Peningkatan kelulusan UN tingkat SMA ini antara lain : meningkatnya profesionalisme guru SMU dimana pada tahun 2011/2012 terdapat 57,11% guru tersertifikasi; meningkatnya jumlah guru yang mengikuti pelatihan mata pelajaran yaitu 841 orang, serta meningkatnya dana yaitu mencapai 37,61 milyar rupiah.

- Angka Partisipasi Murni (SD/MI)

Angka partisipasi yang dijadikan indikator pendidikan antara lain adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM adalah proporsi anak yang bersekolah pada kelompok umur tertentu pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umur tersebut. APM biasanya diterapkan untuk jenjang pendidikan SD (usia 7-12 tahun), SLTP (usia 13-15 tahun) dan SLTA (usia 16-18 tahun). Indikator pendidikan untuk APM difokuskan pada APM SD/MI. Tahun 2010 APM SD/MI mencapai 97,84 dari target 98% dan tahun 2011 naik menjadi 98,27%. Adanya kenaikan APM SD/MI disebabkan adanya berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Gorontalo antara lain: (a) peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan pemberian subsidi bagi sekolah-sekolah terpencil dan swasta, (b) revitalisasi dan regrouping SD/MI. (c) pemberian Beasiswa, (d) pembangunan USB dan RKB dan (d) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain itu dukungan anggaran merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam peningkatan APM yang digunakan untuk kegiatan pembangunan

sarana fisik, maupun peningkatkan mutu salf pengajar. Pada tahun 2011 anggaran untuk pendidikan di Provinsi Gorontalo seluruhnya berjumlah 202, 334 milyar rupiah, yang bersumber dari APBD 52,808 milyar rupiah dan bersumber dari dana APBN 149,525 milyar rupiah.

- **Angka Partisipasi Kasar (SD/MI)**

Berdasarkan data yang diperoleh tahun 2010 angka partisipasi kasar SD/MI mencapai 109,15 dan tahun 2011 turun menjadi 104,57%. Adanya penurunan angka partisipasi kasar ini mengindikasikan mulai adanya pemerataan kesempatan bersekolah berdasarkan wilayah pada tingkat SD/MI. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah daerah, antara lain: (1) Mengoptimalkan capaian APM SD/MI pada tingkat kabupaten/Kota. (2) Menjamin seluruh siswa kelas 1 SD/MI tamat Sekolah dan (3) Bebas buta aksara penduduk usia 15-24 tahun.

3. Kesehatan;

Indikator yang dijadikan untuk mengevaluasi sektor kesehatan adalah: angka kematian bayi, angka harapan hidup, penduduk ber-KB, dan laju pertumbuhan penduduk. Capaian indikator kesehatan di Provinsi Gorontalo tahun 2009-2011 tersaji pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Capaian Indikator Kesehatan Tahun 2009-2011

Indikator	2009	2010	2011
Angka kematian bayi	-	14,70	12,50
Angka harapan hidup	-	70,6	71
Persentase penduduk ber-KB (<i>contraceptive prevalence rate</i>)	-	78,96	84,82
Laju pertumbuhan penduduk	-	2,26	2,22

Sumber : Dikes, BKKBN dan BPS Provinsi Gorontalo, 2012

- **Angka Harapan Hidup**

Angka Harapan Hidup adalah perkiraan rata-rata lamanya hidup yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk dari sejak lahir. Angka harapan hidup penduduk Provinsi Gorontalo terus mengalami

peningkatan yaitu 69,80 tahun pada tahun 2009. Tahun 2010 diproyeksikan Harapan Hidup Penduduk Provinsi Gorontalo menjadi 70,60 tahun, pada tahun 2011 menjadi 71 tahun dan pada tahun 2012 menjadi 71,5. Peningkatan angka harapan hidup ini membuktikan adanya perbaikan mutu layanan kesehatan di Provinsi Gorontalo, meskipun demikian secara nasional angka harapan hidup penduduk Gorontalo masih berada di urutan ke 23 dari 33 provinsi.

- Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi atau *Infant Mortality Rate* (IMR) adalah proporsi bayi meninggal setelah dilahirkan dan sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran di tahun yang sama. Angka kematian bayi Provinsi Gorontalo pada tahun 2010 menunjukkan kecenderungan menurun yaitu dari 14,70 menjadi 12,50 per 1000 kelahiran hidup.

Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menurunkan angka kematian bayi ini antara lain melalui: Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan anak di seluruh Fasilitas Kesehatan di Provinsi Gorontalo, peningkatan/ penguatan Imunisasi melalui Gerakan Akselerasi Imunisasi Nasional (GAIN) UCI, pemerataan Jangkauan terutama daerah yang belum mencapai UCI, kampanye campak terintegrasi dengan polio, serta pengembangan Desa Siaga Aktif atau Kelurahan Siaga Aktif dalam mendukung kegiatan untuk menurunkan Angka Kematian Bayi dan Balita. Implementasi dari program kesehatan di atas terlihat dari adanya peningkatan Presentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu untuk wilayah kota 91,4% dan desa 72,5%; Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal 84%, serta cakupan kunjungan Neonatal Pertama (KN1) mencapai 95%.

- Persentase penduduk ber-KB (*contraceptive prevalencerate*)

Penduduk yang mengikuti program keluarga berencana dapat dijadikan sebagai salah satu indikator tingkat kesehatan penduduk. Persentase penduduk Ber-KB menunjukkan rasio antara jumlah pasangan usia subur yang mengikuti program KB dengan jumlah pasangan usia subur. Pada tahun 2010 persentase penduduk ber-KB

di Provinsi Gorontalo mencapai 78,96 dan tahun 2012 mencapai 84,82. Peningkatan jumlah peserta KB di Provinsi karena adanya strategi penggarapan program KB melalui *Standar Operasional Prosedur* (SOP). Selain itu dilakukan melalui pemanfaatan momentum antara lain: pelayanan serentak melalui kegiatan operasional pelayanan dengan mobil unit KB, KB Polri atau KB Bhayangkara, Operasi manunggal KB-Kesehatan, KB-IBI (Ikatan Bidan Indonesia), KB-PGRI dan KB-PKK.

- Laju pertumbuhan penduduk

Laju pertumbuhan penduduk menunjukkan perkembangan jumlah penduduk dari tahun ke tahun yang dipengaruhi oleh angka kelahiran, angka kematian dan migrasi. Pada tahun 2009 jumlah penduduk 983.952 orang dan tahun 2010 bertambah menjadi 1.040.164 orang. Berdasarkan data ini laju pertumbuhan penduduk tahun 2010 adalah 2,26%. Pada tahun 2011 jumlah penduduk Provinsi Gorontalo bertambah menjadi 1.063.264 orang dengan laju pertumbuhan penduduk 2,22 % dan tahun 2012 diproyeksikan menjadi 1.086.877 orang. Peningkatan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor yang turut berpengaruh pada peningkatan jumlah penduduk di Provinsi Gorontalo. Selain itu pesatnya kemajuan pendidikan tinggi yang ada di provinsi ini mendorong siswa dari luar daerah banyak yang kuliah di daerah ini sehingga meningkatkan jumlah penduduk.

4. Penanggulangan Kemiskinan

Indikator yang dijadikan untuk mengevaluasi penanggulangan kemiskinan adalah: persentase penduduk miskin dan pengangguran terbuka. Capaian indikator penanggulangan kemiskinan di Provinsi Gorontalo tahun 2009-2011 tersaji pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Capaian Indikator Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2009-2011

Indikator	2009	2010	2011
Persentase penduduk miskin	25,01	23,19	18,75
Tingkat pengangguran terbuka	5,06	5,16	4,25

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, 2012

- Persentase penduduk miskin

Penduduk miskin Provinsi Gorontalo selang dua tahun terakhir memperlihatkan kecenderungan yang menurun, Pada tahun 2010 kemiskinan Provinsi Gorontalo mencapai 23,19% dan tahun 2011 mencapai 18,75%. Selang dua tahun ini penurunannya cukup signifikan hampir 4% dan melampaui target yaitu 19,00%.

Kebijakan yang ditempuh pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menurunkan kemiskinan adalah: dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dalam bentuk bebas dari kemiskinan, pengangguran, minimnya sandang, pangan, dan papan, serta keterbatasan infrastruktur dasar ekonomi. Untuk itu, peningkatan ekonomi masyarakat lebih ditekankan pada peningkatan akses masyarakat ke sumber-sumber ekonomi dalam *frame* agropolitan sehingga kinerja sektor unggulan daerah meliputi pertanian, perkebunan, perikanan kelautan, dan peternakan secara nyata dapat meningkatkan kemakmuran rakyat. Disamping itu, ditempuh kebijakan untuk membangkitkan industri dan usaha kecil menengah yang berbasis pada kompetensi daerah, peningkatan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta peningkatan investasi di daerah. Untuk itu, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam bidang ekonomi adalah terpenuhinya hak untuk berusaha, hak untuk memperoleh akses atas kebutuhan infrastruktur dasar ekonomi, hak berinovasi, hak untuk memperoleh akses permodalan, hak atas kesetaraan ekonomi, hak atas pemerataan distribusi barang dan jasa, hak atas informasi, serta hak atas pengelolaan SDA.

- Tingkat pengangguran terbuka

Angka pengangguran di Provinsi Gorontalo cenderung mengalami penurunan yaitu: 5,16% pada tahun 2010 dan tahun 2011 turun menjadi 4,25. Meskipun demikian hal yang perlu dicari jalan keluar adalah peningkatan jumlah pengangguran yang terdidik. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo tahun 2010, jumlah tenaga yang berpendidikan sarjana mencapai 25% dari total jumlah pengangguran sebanyak 26.900 orang. Berdasarkan hasil identifikasi isu dan masalah sentral ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo adalah : 1) Kecenderungan tenaga kerja untuk menjadi pegawai negeri sipil sangat tinggi. Hal ini terjadi karena ada anggapan bahwa dengan menjadi pegawai Negeri Sipil, maka dengan sendirinya status sosial di masyarakat akan terangkat; 2) Kultur memilih-milih pekerjaan sehingga lowongan pekerjaan yang ada akan terisi oleh tenaga kerja luar daerah; 3) rendahnya kualitas dan kapasitas SDM sehingga tenaga kerja lokal tidak mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah, sehingga berpengaruh pada tingkat pengangguran; dan 4) rendahnya kemampuan menciptakan kesempatan kerja serta rendahnya jiwa wirausaha sehingga banyak orang luar daerah yang cukup berhasil di Provinsi Gorontalo. Dalam teknis penanggulangan pengangguran selama ini Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) melakukannya secara parsial sehingga hasilnya tidak efektif dan tumpang tindih.

5. Ketahanan Pangan

Indikator yang dijadikan untuk mengevaluasi pelaksanaan ketahanan pangan, PDRB sektor pertanian, nilai tukar petani dan nelayan, produksi padi, dan jumlah penyuluh pertanian. Capaian indikator pelaksanaan ketahanan pangan di Provinsi Gorontalo tahun 2009-2011 tersaji pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11 Capaian Indikator Ketahanan Pangan 2009-2011

Indikator	2009	2010	2011
PDRB Sektor Pertanian Harga berlaku (Rp. Jutaan)	2,096,062	2.332.224	2.691.950
Nilai Tukar Petani	99,47	101.66	104,08
Produksi Padi (ton)	256.217	253,56	273.921
Jumlah Penyuluh Pertanian	-	570	614
Nilai Tukar Nelayan	-	107,72	106,79

Sumber: BPS, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Bakorluh Provinsi Gorontalo, 2012

- PDRB Sektor Pertanian

Semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan “Produk Domestik” daerah bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan “Pendapatan Domestik”. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian menggambarkan barang dan jasa yang dihasilkan sektor pertanian. Pada tahun 2010 PDRB sektor pertanian Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan, yaitu dari Rp. 833.677 juta menjadi Rp. Rp. 885.109 juta.

- Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima (It) dan dibayar (Ib) petani. Untuk Provinsi Gorontalo NTP sangat penting karena sebagian besar penduduk provinsi ini bekerja di sektor pertanian. Pada tahun 2010, NTP 101,66, tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi 104,08. Sedangkan pada tahun 2012 ini sampai triwulan II rata-rata capaian NTP adalah 102,72. Berdasarkan angka ini diproyeksikan NTP tahun 2012 akan melampaui NTP tahun 2011. Data capaian ini mengindikasikan terjadi peningkatan kesejahteraan petani di Provinsi Gorontalo. Hal ini disebabkan oleh makin baiknya perekonomian daerah secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh kenaikan pertumbuhan ekonomi. Dampak naiknya

pertumbuhan ekonomi ini, menarik sektor pendapatan sektor pertanian yang ditunjukkan oleh kenaikan PDRB sektor ini, dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan petani.

- **Produksi Padi**

Produksi padi yang dihasilkan oleh Provinsi Gorontalo cenderung fluktuatif,. Pada tahun 2010 berdasarkan angka tetap yang dikeluarkan oleh dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan produksi padi mencapai 253.560 ton, dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan yaitu menjadi 273.921 ton. Pada tahun 2012 ini berdasarkan angka ramalan sementara sampai bulan produksi padi sawah 264.233 ton. Cukup stabilnya produksi padi di Provinsi Gorontalo antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim yang menunjang, serta ditunjang dengan berbagai program pemerintah di bidang tanaman pangan seperti halnya subsidi benih, pupuk dan juga fasilitas lain, dimana pelaksanaannya dilakukan secara berkelanjutan.

- **Jumlah Penyuluh Pertanian**

Penyuluh pertanian adalah orang yang memberikan dorongan kepada para petani agar mau mengubah cara berfikirnya dan cara hidupnya yang lama dengan cara yang baru melalui proses penyebaran informasi seperti pelatihan, kursus, kunjungan yang berkaitan dengan perubahan dan perbaikan cara-cara berusahatani, usaha peningkatan produktivitas pendapatan petani serta perbaikan kesejahteraan keluarga petani atau masyarakat. Keberadaan penyuluh pertanian berhubungan dengan pembentukan Badan Penyuluh Pertanian di Provinsi Gorontalo. Keberadaan lembaga ini terbentuk pada tahun 2009 dan mengidentifikasi jumlah penyuluh di provinsi ini pada tahun 2010 sebanyak 570 penyuluh dan pada tahun 2011 menjad 614 penyuluh. Perhatian Pemerintah Daerah pada peran penyuluh ini terlihat dengan dibentuknya Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian sebagai suatu instansi tersendiri yang menangani penyuluhan dan diikuti dengan pembentukan badan ini di tingkat kabupaten/kota. Selain itu untuk memberikan berbagai masukan kepada Gubernur

telah dibentuk pula Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Gorontalo melalui Keputusan Gubernur Provinsi Gorontalo No. 371/32/IX/2012. Komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo kepada para penyuluh ini adalah dengan memberikan berbagai insentif dan fasilitasi, bahkan ke depan pemerintah Provinsi Gorontalo memprogramkan satu desa satu penyuluh.

- Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Nelayan adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima (It) dan dibayar (Ib) nelayan. Nilai Tukar Nelayan di Provinsi Gorontalo berada di atas 100, meskipun datanya memperlihatkan penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat nelayan tergolong baik. Keadaan ini disebabkan oleh berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui program Etalase Perikanan yang merupakan salah satu program utama pemerintah daerah khususnya pada periode 2002-2012.

6. Infrastruktur

Indikator yang dijadikan untuk mengevaluasi pelaksanaan infrastruktur adalah panjang jalan nasional dalam kondisi baik, pembangunan rumah sederhana, perda RTRW dan pengesahannya. Capaian indikator infrastruktur di Provinsi Gorontalo tahun 2009-2011 tersaji pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12 Capaian Indikator Infrastruktur Tahun 2009-2011

Indikator		2009	2010	2011
% panjang jalan nasional dalam kondisi:	Baik	73,88	73,88	87,85
	Sedang	17,51	17,51	8,97
	Buruk	8,61	8,61	3,18
Jumlah Pembangunan Rumah Sederhana/ Provinsi (dalam unit)		15	100	100
Perda RTRW Provinsi		7	7	7
Persentase kab/kota yang telah mensahkan Perda RTRW		100	100	100

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2012

- Persentase panjang jalan nasional dalam kondisi baik, sedang dan buruk,
 Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian masyarakat. Status jalan menurut kewenangannya dan sumber pembiayaannya dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota. Di tahun 2009, panjang jalan negara di Provinsi Gorontalo tercatat sepanjang 616,24 km, sedangkan panjang jalan provinsi adalah sejauh 408,26 km. Panjang jalan nasional selang tahun 2009-2010 mengalami peningkatan dalam keadaan baik di Provinsi Gorontalo selang tahun 2004-2007 mengalami penurunan yang disebabkan oleh bencana banjir maupun tanah longsor. Akan tetapi selang tahun 2007-2009 persentase jalan nasional dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebagai dampak adanya perbaikan dari tahun ke tahun. Sampai tahun 2011 kondisi jalan nasional yang baik 87,85%, kondisi sedang 8,97% dan buruk 3,18%.
- Jumlah Pembangunan Rumah Sederhana/Provinsi Gorontalo
 Untuk penyelenggaraan pembangunan rumah sederhana di Provinsi Gorontalo sejak tahun 2009 di bawah operasional Badan Penanggulangan dan Pemberdayaan Kemiskinan Provinsi Gorontalo. Pembangunan rumah sederhana ini dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yaitu tahun 2009 jumlahnya 100 unit, tahun 2010 dan tahun 2012 dibangun sebanyak 125 unit.
- Perda RTRW Provinsi Gorontalo
 Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) di Provinsi Gorontalo telah dilakukan sejak provinsi ini terbentuk. Sampai tahun 2011 ini seluruh kabupaten/kota telah menetapkan Perda RTRW.
- Persentase kab/kota yang telah mensahkan Perda RTRW Provinsi Gorontalo
 Sampai tahun 2011 seluruh kabupaten/kota yaitu terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota telah mensahkan Perda RTRW. Meskipun demikian sejak tahun 2010 telah dilakukan upaya revisi RTRW baik

provinsi maupun kabupaten karena telah terjadi perubahan beberapa fungsi lahan.

7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Indikator yang dijadikan untuk mengevaluasi pelaksanaan iklim investasi dan iklim usaha adalah: kredit UMKM, realisasi PMA dan PMDN, alokasi kredit perbankan dan jumlah investor. Capaian indikator investasi dan iklim usaha di Provinsi Gorontalo tahun 2009-2011 tersaji pada Tabel 4.13.

Tabel 4.13 Capaian Indikator Iklim Investasi dan Iklim Usaha Tahun 2009-2011

Indikator	2009	2010	2011
Persentase kredit UMKM	-	4,86	5,66
Nilai Realisasi Investasi PMA (US\$ Juta)	79,11	24,66	21,84
Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp. jutaan)	-	56,84	-
Jumlah alokasi kredit perbankan (Milyar Rupiah)	1.023	3.640	4.250
Jumlah investor PMA		29	17
Jumlah investor PMDN		6	6
Jumlah tabungan masyarakat (Rp. Milyar)	1.191	1.350	1.350

Sumber: Laporan EKPD 2009, 2010 dan 2011

- Nilai Realisasi Investasi PMA
Investasi PMA secara parsial nilainya mengalami penurunan, tetapi akumulasinya memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan. PMA di Provinsi Gorontalo umumnya pada sektor pertanian dan pertambangan.
- Nilai Realisasi Investasi PMDN
Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri adalah penanaman uang atau di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan dimana sumber modalnya adalah dari dalam negeri. Selang tahun 2010-2011 PMDN terealisasi pada tahun 2010 yaitu sebesar 56,84 milyar.
- Persentase kredit UMKM

Dalam perekonomian Indonesia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu Kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah yang melibatkan banyak kelompok melalui pemberian kredit Perbankan. Pada tahun 2010 persentase kredit UMKM terhadap kredit perbankan secara keseluruhan adalah 4,86% dan tahun 2011 naik menjadi 5,66%.

- Jumlah alokasi kredit perbankan
Jumlah alokasi kredit perbankan Provinsi Gorontalo tahun 2010 mencapai 3.640 milyar rupiah dan tahun 2011 naik menjadi 4.258 milyar rupiah.
- Jumlah tabungan masyarakat
Tabungan masyarakat merupakan unsur penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Tabungan masyarakat menyediakan sumber dana yang membuka peluang bagi berlangsungnya penanaman modal atau investasi. Sampai tahun 2009 jumlah tabungan masyarakat mencapai 1.191 milyar rupiah dan pada tahun 2010 mencapai 1.350 milyar rupiah.

8. Energi

Indikator yang dijadikan untuk mengevaluasi pelaksanaan prioritas bidang energi adalah: rasio elektrifikasi dan kapasitas pembangkit listrik. Capaian indikator energi di Provinsi Gorontalo tahun 2009-2011 tersaji pada Tabel 4.14.

Tabel 4.14 Capaian Indikator Energi Tahun 2009-2011

Indikator	2009	2010	2011
Rasio Elektrifikasi	44.83	48.8%	69,97%
Kapasitas pembangkit listrik	-	55.820	55.820

Sumber : PLN Provinsi Gorontalo, 2011

- **Rasio Elektrifikasi**

Kemajuan pembangunan di Provinsi Gorontalo berdampak pada peningkatan jumlah pemasangan listrik baik untuk rumah tangga, pemerintah maupun swasta. Rasio elektrifikasi Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan pada dua tahun terakhir, yaitu tahun 2010 sebesar 48,8% dan tahun 2011 menjadi 69,97%. Untuk rasio desa berlistrik pada tahun 2010 89,92 dan tahun 2011 dan 2012, naik menjadi 99,29. Peningkatan rasio ini menunjukkan bahwa pelayanan kelistrikan di Provinsi Gorontalo dari tahun ke tahun semakin ditingkatkan.

- **Kapasitas pembangkit listrik**

Kebutuhan tenaga listrik Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo dilayani oleh sistem kelistrikan Sulawesi Utara, Tengah dan Gorontalo sehingga neraca daya provinsi-provinsi tersebut direpresentasikan oleh neraca daya Sistem Sulawesi Utara, Tengah dan Gorontalo. Pada tahun 2010 sistem berada pada kondisi defisit dan selanjutnya pada tahun 2011 s.d 2014 sistem berada pada kondisi yang baik direncanakan tambahan infrastruktur ketenagalistrikan dari tahun 2010-2014 yaitu: Pembangkit tenaga listrik sebesar 93 MW. Transmisi tenaga listrik 544 kms; Gardu induk 140 MVA; dan Program energi baru terbarukan (EBT) dan jaringan: Untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan 5 tahun ke depan tersebut, dibutuhkan investasi sekitar USD 459,2 juta, dengan rinciannya adalah pembangkitan USD 160,3 juta, transmisi USD 22,5 juta, gardu induk USD 10,9 juta dan program Energi Baru Terbarukan USD 265,5 juta.

9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Indikator yang dijadikan untuk mengevaluasi pelaksanaan sektor prioritas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana adalah: kualitas lingkungan hidup, indeks tutupan lahan, luas lahan rehabilitasi, frekuensi terjadi bencana, kejadian bencana, ruang terbuka hijau, dan pembentukan badan penanggulangan bencana. Capaian indikator lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo tahun 2009-2011 tersaji pada Tabel 4.15.

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Menurut Balihristi Provinsi Gorontalo (2011) secara umum hampir seluruh jenis sumberdaya alam dan komponen lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo cenderung mengalami penurunan kualitas dan kuantitasnya dari waktu ke waktu dan dari tahun ke tahun menghadapi tantangan dan tekanan yang semakin kuat. Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Gorontalo telah dilakukan pada tahun 2010 dan mengacu metode yang digunakan untuk mengukur IKLH Nasional yang dikembangkan oleh BPS. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Gorontalo menggunakan tiga indikator yang berkorelasi terhadap kualitas lingkungan, yaitu kualitas air sungai; kualitas udara dan tingkat tutupan hutan. Hasil pemantauan yang dilakukan pada sungai-sungai yang lintas kabupaten/kota dan sungai strategis untuk parameter indeks kualitas air; Lokasi-lokasi yang tersebar di kabupaten/kota yang mewakili lokasi permukiman, perkantoran, industri, pusat perdagangan dan transportasi untuk indeks kualitas udara; dan Luasan tutupan hutan kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo yang dibandingkan dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 325 tahun 2010 untuk parameter indeks tutupan hutan. Hasil analisis menunjukkan bahwa indeks kualitas air: 46,67; indeks kualitas udara: 93,04, indeks tutupan hutan: 86,19 dan indeks kualitas lingkungan hidup 75,74. Data ini diproyeksi belum banyak berubah sampai tahun 2012 ini.

Tabel 4.15 Capaian Indikator Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Tahun 2009-2011

Indikator		2010	2011
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	75,74.	75,74.
Indeks Tutupan Hutan	-	86,19	86,19
Persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis	43,34	46,74	46,74
Frekuensi terjadi bencana	-	18	20
Persentase ruang terbuka hijau (RTH) di Ibukota Provinsi	18,00	18	18
Persentase pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di kab/kota/provinsi	43.00	100	100

Sumber: Balihristi, BPBD dan Laporan EKPD 2009, 2010 dan 2011 Provinsi Gorontalo

- Indeks Tutupan Hutan.

Berdasarkan data analisis areal hutan di Provinsi Gorontalo tahun 2010, tercatat seluas 824.668 ha, yang terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas dan sisanya merupakan hutan produksi tetap serta produksi konservasi. Menurut Balihristi (2011) Provinsi Gorontalo telah kehilangan 1 % hutannya. Jika setiap tahun terjadi areal hutan hilang maka diprediksi selang 20 tahun ke depan daerah ini akan kehilangan seluruh potensi hutannya jika tidak ada usaha konservasi dan rehabilitasi. Kondisi tutupan lahan di Provinsi Gorontalo belum banyak berubah pada 3 tahun belakangan ini yaitu 86,19 %

- Persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis

Secara garis besar lahan yang ada di Provinsi Gorontalo merupakan kawasan hutan, hal ini ditunjukkan dari hasil analisis luas wilayah menurut penggunaan lahan utama. Menurut Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Informasi Teknologi (Balihristi) tahun 2011, 36% lahan atau daratan di Gorontalo merupakan kawasan hutan. Non pertanian sebesar 32%, lahan kering 18%, perkebunan 9% dan sawah 2% serta penggunaan lahan lainnya sebesar 3%. Berdasarkan hasil analisis luas lahan kritis di Provinsi Gorontalo adalah 1034,637ha, sedangkan luas lahan kritis pada lahan konservasi sebesar 92.353 ha atau

46,74%. Angka ini diperkirakan belum banyak berubah selang tiga tahun terakhir ini.

- Frekuensi terjadi bencana,
Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Gorontalo kejadian bencana yang terjadi tahun 2010 sebanyak 18 kali dan pada tahun 2011 sebanyak 20 kali. Umumnya jenis bencana yang terjadi di wilayah ini adalah banjir dan tanah longsor serta angin puting beliung. Salah satu penyebab dari bencana ini adalah adanya intensitas hujan yang cukup tinggi serta adanya kerusakan hutan.
- Persentase ruang terbuka hijau (RTH) di Ibukota Provinsi
Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. Sampai tahun 2011 jumlah RTH di Ibu kota provinsi adalah 18 % dan angka ini tetap stagnan pada 3 tahun terakhir ini.
- Persentase pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di kab/kota/provinsi
Untuk tanggap bencana di daerah, dibentuk lembaga yang khusus mengkoordinasi tentang penanggulangan bencana yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Tahun 2009 hanya 3 daerah dari 7 daerah (termasuk provinsi) yang mempunyai lembaga ini, tapi sejak tahun 2010, 100% wilayah Provinsi Gorontalo telah memiliki BPBD.

10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca-konflik

Indikator yang dijadikan untuk mengevaluasi pelaksanaan sektor prioritas indikator daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik adalah: indeks gini, kabupaten tertinggal, dan kemiskinan. Capaian indikator daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik di Provinsi Gorontalo tahun 2009-2011 tersaji pada Tabel 4.16.

- Perkiraan Penurunan Jumlah Kabupaten Tertinggal hingga 2014
Sampai tahun 2012 Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota. Awal terbentuknya provinsi terdiri dari 1 kota dan 2 kabupaten. Pada tahun 2010 jumlah kabupaten tertinggal mencapai 4 kabupaten, dan pada tahun 2011, satu kabupaten berhasil keluar dari kriteria sebagai kabupaten tertinggal, sehingga jumlah kabupaten tertinggal menjadi 3 kabupaten. Diproyeksikan sampai tahun 2014 akan ada lagi 1 kabupaten di provinsi ini yang akan keluar dari kriteria sebagai kabupaten tertinggal. Akan tetapi yang menjadi kendala pimpinan daerah pada kabupaten tertinggal belum menginginkan wilayahnya keluar dari kriteria sebagai kabupaten tertinggal karena alasan dapat mengurangi penyaluran anggaran dari pusat.

Tabel 4.16 Capaian Indikator Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik Tahun 2009-2011

Indikator	2009	2010	2011
Indeks Gini	-	0,43	0,46
Jumlah Kabupaten Tertinggal	4	4	3
Perkiraan penurunan jumlah Kab tertinggal hingga 2014	-	4	3
Kemiskinan		23,19	18,75

Sumber : BPS dan Bappeda Provinsi Gorontalo, 2012

- Indeks Gini
Data tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa indeks Gini Provinsi Gorontalo mengalami kisaran yang fluktuatif. Pada tahun 2010 Indeks Gini mencapai 43; tahun 2011 mencapai 46 dan pada tahun 2012 mencapai 44. Berdasarkan kriteria yang digunakan oleh Todaro (2000) Indeks Gini Provinsi Gorontalo ini berada dalam kategori ketimpangan sedang. Data tentang Indeks Gini Provinsi Gorontalo khusus daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik belum diperoleh.
- Jumlah Kabupaten Tertinggal
Data tahun 2009 jumlah kabupaten tertinggal di Provinsi Gorontalo sebanyak 4 buah dari 6 buah kabupaten Gorontalo. Kondisi ini terjadi sampai tahun 2010, tetapi tahun 2011 terdapat 1 kabupaten yang tidak

lagi berada dalam kategori kabupaten tertinggal yaitu Kabupaten Bone Bolango, sehingga sampai tahun 2011 jumlah kabupaten tertinggal di Provinsi Gorontalo berjumlah 3 buah atau 50% dari kabupaten yang ada. Ketiga kabupaten yang tergolong tertinggal ini tidak termasuk dalam wilayah terdepan, terluar dan pasca konflik karena ketiganya tidak jauh dari pusat kota provinsi.

- Kemiskinan

Profile kemiskinan daerah tertinggal di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada capaian angka kemiskinan Provinsi Gorontalo, mengingat sampai tahun 2011 masih terdapat 50% kabupatennya yang dalam kategori tertinggal.

11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi.

Indikator yang dijadikan untuk mengevaluasi pelaksanaan sektor kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi adalah: jumlah paten, jumlah dosen peneliti, perpustakaan, dan jumlah hasil riset. Capaian indikator kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi di Provinsi Gorontalo tahun 2009-2011 tersaji pada Tabel 4.17.

Tabel 4.17 Capaian Indikator Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi Tahun 2009-2011

Indikator	2009	2010	2011
Jumlah paten (HAKI)	6	1	1
Jumlah dosen peneliti PTN/PTS	380	536	625
Jumlah perpustakaan	181	848	848
Jumlah hasil riset dari lembaga riset	37	36	56

Sumber : Berbagai sumber, 2012

- Pelestarian Budaya

Kebudayaan masyarakat Gorontalo secara umum tergambar dari budaya, tradisi dan adat. Masyarakat Gorontalo mempunyai satu struktur budaya dengan filosofi budaya tertuang dalam ungkapan *'Batanga pomayaa, nyawa podungalo, alata potombulu'* artinya diri diabdikan, nyawa dipertaruhkan, dan harta dikorbankan, yang

didasarkan pada adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Pelestarian budaya di Gorontalo dapat dilihat dari terpeliharanya tradisi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan Gorontalo. Tradisi tersebut terbagi atas empat jenis, yaitu: (1) Tradisi yang berhubungan dengan upacara perkawinan, penobatan dan penyambutan pejabat, pemakaman, gunting rambut dan pembeatan; (2) tradisi yang berhubungan dengan kesenian yang berbentuk *religious arts* seperti *zikir, burdah, dana-dana* dan *zamrah*; (3) tradisi yang berhubungan dengan gerak dan olahraga, tarian seperti *langga, longgo, tidi*; dan (4) tradisi yang berhubungan dengan sastra.

- Terlindunginya hasil kreatifitas, inovasi dan teknologi
Perlindungan terhadap hasil kreatifitas, inovasi dan teknologi dari tahun ke tahun terus ditingkatkan. Hal ini tidak saja dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi juga oleh kalangan akademisi maupun swasta. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui sosialisasi yang dilakukan baik secara langsung maupun lewat media masa, seperti halnya sosialisasi tentang hak paten yang dilakukan oleh Kemenkumham pada seluruh stakeholder terkait di Provinsi Gorontalo. Untuk kalangan perguruan tinggi digaungkan pada mahasiswa untuk sejak dini menolak plagiat, melalui kebijakan pemberian sanksi akademik kepada mereka yang melakukan plagiat.
- Berkurangnya tingkat pembajakan terhadap hak Paten
Belum ada data dan informasi yang mengungkapkan tingkat pembajakan terhadap Hak Paten di Provinsi Gorontalo, meskipun demikian kondisinya masih dalam taraf yang belum mengkhawatirkan, karena secara kasat mata jumlahnya yang relatif kecil. Selama ini belum ditemukan pelanggaran terhadap pembajakan hak paten yang meresahkan masyarakat.
- Jumlah paten (HAKI),
Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk

melaksanakannya. Jumlah paten yang dimiliki oleh masyarakat Provinsi Gorontalo umumnya dimiliki oleh kalangan akademik. Tahun 2009 Hak Paten yang dimiliki adalah 6, sedangkan tahun 2010 dan 2011 masing-masing 1 paten lagi.

- Jumlah dosen peneliti PTN/PTS,
Pada tahun 2012 jumlah Perguruan Tinggi Negeri di Provinsi Gorontalo ada 3 buah, yaitu: Universitas Negeri Gorontalo berada di bawah Kemendiknas, IAIN Sultan AMAI berada di bawah Kementerian Agama dan Politeks di bawah Kementerian Kesehatan. Jumlah PTS ada 11 buah yang tersebar di kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan data dapat diidentifikasi jumlah dosen seluruh PTN/PTS di Provinsi Gorontalo berjumlah 892 orang. Jika diproyeksikan pada tahun 2010 jumlah dosen peneliti 60% dari jumlah dosen yang ada maka jumlah dosen peneliti tahun 2010 berjumlah 536 orang. Selanjutnya jika diproyeksikan pada tahun 2011 dan 2012 terjadi kenaikan jumlah dosen meneliti 70% maka jumlah dosen peneliti adalah masing-masing 635.
- Jumlah perpustakaan,
Perpustakaan sangat terkait dengan keberadaan lembaga pendidikan yang dimiliki oleh suatu wilayah. Untuk Provinsi Gorontalo sampai saat ini telah memiliki perpustakaan daerah sendiri yang dikelola oleh pemerintah daerah. Berdasarkan data tahun 2012 yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Olahraga 56,9% dari jumlah SD/MI telah memiliki perpustakaan, 57,4% SMP/MTs memiliki perpustakaan, dan 68,9% SMU/MA memiliki perpustakaan. Selanjutnya setelah ditambahkan dengan jumlah dengan jumlah perpustakaan pada tingkat Perguruan Tinggi yang terdiri dari 14 PTN/PTS dan perpustakaan daerah jumlah perpustakaan di Provinsi Gorontalo berjumlah 848 buah. Jumlah ini pada tiga tahun terakhir belum banyak mengalami perubahan.
- Jumlah hasil riset dari lembaga riset,
Lembaga Riset yang terdapat di Provinsi Gorontalo adalah Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi Informasi di bawah Pemerintah

Daerah Provinsi dan beberapa Lembaga penelitian di Perguruan Tinggi Negeri/Swasta.

12. Kesejahteraan Rakyat;

Indikator yang dijadikan untuk mengevaluasi pelaksanaan sektor kesejahteraan rakyat adalah: IPM, pendapatan per kapita, angka harapan hidup, dan penyerapan tenaga kerja. Capaian indikator kesejahteraan di Provinsi Gorontalo tahun 2009-2011 tersaji pada Tabel 4.18.

Tabel 4.18 Capaian Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2009-2011

Indikator	2009	2010	2011
IPM	69.18	70,28	70,63
Pendapatan per kapita (Rp)	6,933	2.804.838	2.955.601
Gizi Buruk	4.68	4,40	4,31
Rata-rata lama sekolah	-	7,10	7,10
Angka harapan hidup	-	70,60	70,10
Tingkat penyerapan tenaga kerja (%)	-	94,84	95,75

Sumber: Bappeda Provinsi Gorontalo, 2012

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Provinsi Gorontalo memperlihatkan kecenderungan meningkat, dimana pada tahun 2009 mencapai 69,18 tahun pada tahun 2010 meningkat menjadi 70,28. Hal ini membuktikan bahwa terjadi perbaikan secara berkelanjutan aspek-aspek penyusun IPM yaitu pendidikan, kesehatan dan pendapatan di Provinsi Gorontalo. Peningkatan IPM ini tidak lain disebabkan oleh adanya komitmen pemerintah daerah yang tinggi membangun kemampuan manusia (*human capabilities*).

- Pendapatan per kapita,

Pendapatan per kapita masyarakat Provinsi Gorontalo terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 pendapatan per kapita sebesar Rp.2.804.838 dan tahun 2011 meningkat menjadi 2.955.601. Peningkatan pendapatan per kapita ini didorong oleh adanya

peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo yang cenderung meningkat, dibarengi dengan penyerapan tenaga kerja yang semakin meningkat dan iklim usaha yang semakin sehat. Hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya sektor jasa terutama di pusat pemerintahan daerah kabupaten/kota dan provinsi.

- **Gizi Buruk**

Gizi buruk atau lebih dikenal dengan gizi di bawah garis merah adalah keadaan kurang gizi tingkat berat yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari dan terjadi dalam waktu yang cukup lama. Tahun 2009-2010 terjadi penurunan Gizi Buruk di Provinsi Gorontalo yaitu dari 4,68% menjadi 4,49%. Pada tahun 2011 angkanya turun 4,31 dan tahun 2012 ini diperkirakan turun menjadi 4,22.

13. Politik, Hukum, dan Keamanan;

Indikator yang dijadikan untuk mengevaluasi pelaksanaan sektor politik, hukum dan keamanan adalah: indeks kriminal dan penyelesaian kasus kejahatan. Capaian indikator politik, hukum dan keamanan di Provinsi Gorontalo tahun 2009-2011 tersaji pada Tabel 4.19.

- **Indeks kriminalitas**

Indeks kriminalitas adalah jumlah kasus kejahatan yang dapat diselesaikan oleh Kepolisian Daerah Gorontalo dibagi dengan jumlah penduduk dikali 100%. Selang tahun 2010 dan 2011 indeks kriminalitas Provinsi Gorontalo mengalami penurunan meskipun dalam jumlah yang kecil, yaitu tahun 2010 sebesar 1,57 dan sampai tahun 2011 menjadi 1,56. Kasus kejahatan yang menonjol adalah penganiayaan, penipuan, penggelapan dan penghinaan. Pesatnya pembangunan di Provinsi Gorontalo memberikan berbagai gesekan pada masyarakat karena adanya berbagai kepentingan sehingga menimbulkan kejahatan baik konvensional maupun transnasional. Dari kedua jenis kejahatan ini yang dominan di Provinsi Gorontalo adalah kejahatan konvensional. Kejahatan konvensional yang banyak

ditangani oleh Polda Gorontalo penganiayaan dan asusila. Kasus terbanyak yang dilaporkan dan diselesaikan dari tahun ke terdapat di wilayah kerja Polres Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo. Hal ini terjadi karena Kota Gorontalo adalah wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo sehingga kompleksitas permasalahan cukup banyak, sedangkan Kabupaten Gorontalo disebabkan oleh jumlah penduduk yang terbanyak di Provinsi Gorontalo. Faktor yang mempengaruhi fluktuatifnya persentase penyelesaian kasus konvensional adalah dari bukti yang ditemukan.

Secara umum kondisi keamanan di Gorontalo cukup aman dan terkendali, hal ini tidak lain disebabkan oleh makin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi dan menjaga keamanan wilayahnya masing-masing. Selain itu adanya filosofis hidup bermasyarakat yang menjadi pedoman setiap kabupaten/kota turut memberikan kontribusi yang positif dalam menekan angka kejahatan. Contohnya; kabupaten Boalemo Bertasbih, Kota Gorontalo Kota Madrasah serta pedoman umum kehidupan masyarakat Gorontalo, yaitu *agama bersendikan sara, sara bersendikan kitabullah*. Persentase penyelesaian kasus kejahatan konvensional,

Upaya peningkatan keamanan dan penanggulangan kriminalitas di Provinsi Gorontalo menunjukkan hasil yang semakin baik. Gangguan keamanan, ketertiban, dan kriminalitas masih dalam tingkat yang terkendali. Hal ini terlihat antara lain dari upaya penanganan kejahatan konvensional yaitu kejahatan yang dianggap oleh semua orang sebagai kejahatan, seperti halnya pencurian, perampokan, pembunuhan dan judi serta kejahatan konvensional lainnya. Namun demikian, pengadaan dan peningkatan institusi keamanan dan ketertiban masyarakat telah ikut menekan angka kejahatan di Provinsi Gorontalo.

Data penanganan kasus kejahatan konvensional memperlihatkan persentase jumlah kasus yang dapat diselesaikan dengan yang dilaporkan pada tahun 2010 angkanya 42,27% dan tahun 2011 angkanya mencapai 45,53%.

Tabel 4.19 Capaian Indikator Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2009-2011

Indikator	2009	2010	2011
Indeks kriminalitas	1,04	1,57	1,56
Persentase penyelesaian kasus kejahatan konvensional	60,00	42,74	45,63
Persentase penyelesaian kasus kejahatan transnasional	12,00	0,00	0,00

Sumber: Laporan EKPD 2009, 2010 dan 2011

- Persentase penyelesaian kasus kejahatan transnasional, Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang timbul sebagai akibat globalisasi dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti halnya: terorisme, sindikat narkoba, penjualan senjata gelap, perompakkan di laut, mafia pencucian uang, dan kejahatan melalui Internet (*cyber crime*). Kejahatan transnasional di Provinsi Gorontalo tahun 2009 penyelesaiannya 12%, sedangkan tahun 2010 dan 2011 penyelesaian kasus transnasional 0% karena memang tidak ada kasus transnasional yang terjadi.

Kejadian kasus kejahatan transnasional di Provinsi Gorontalo hanyalah kasus penyalahgunaan narkoba dan zat aditif lainnya. Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, telah berhasil mengungkap beberapa kasus serta terus dilakukan upaya memberantas dan menindak pengedar dan pemakai narkoba baik dalam skala kecil maupun dalam skala sedang. Kejahatan lainnya seperti terorisme bukan merupakan ancaman serius, namun dalam konteks global regional dan internasional maka tetap dilakukan upaya pencegahan secara dini oleh aparat keamanan. Upaya pencegahan terorisme di Gorontalo terintegrasi dengan peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas. Untuk kasus penjualan senjata, perompakkan di laut, mafia pencucian uang serta kejahatan *cyber crime* sampai saat ini belum menjadi ancaman di Provinsi Gorontalo.

14. Perekonomian

Indikator yang dijadikan untuk mengevaluasi pelaksanaan sektor perekonomian adalah: pertumbuhan ekonomi, inflasi, realisasi investasi, PAD, ekspor dan impor. Capaian indikator perekonomian di Provinsi Gorontalo tahun 2009-2011 tersaji pada Tabel 4.20.

Tabel 4.20 Capaian Indikator Perekonomian Tahun 2009-2011

Indikator	2009	2010	2011
Pertumbuhan ekonomi (%)	7,54	7,63	7,20
Inflasi (%)	4,35	7,43	4,08
Nilai realisasi investasi PMA (milyar rupiah)		1.249,565	2.618,324
Nilai realisasi investasi PMDN (milyar rupiah)		757,398	462,149
Perkembangan PAD (ribuan rupiah)	0,14	113.403.871	154.476.716
Pertumbuhan Ekspor		13,032	-4,375
Pertumbuhan Impor	-99,99	14,393	13,196

Sumber: Laporan EKPD Provinsi Gorontalo, 2009, 2010, dan 2011

- Pertumbuhan ekonomi,
Secara umum, pertumbuhan ekonomi Gorontalo dalam 2 tahun terakhir mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2010, ekonomi Gorontalo mencapai mencapai 7,63%, dan tahun 2011 mencapai 7,68%. Pada tahun 2012 ini pada triwulan I pertumbuhan ekonomi mencapai 8,29 % dan triwulan II 8,30%. Berdasarkan angka capaian ini diperkirakan target pertumbuhan ekonomi 7,5 – 8,0% dapat tercapai.
- Inflasi,
Inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus. Terdapat tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi yaitu: kenaikan harga, bersifat umum dan berlangsung terus menerus. Secara umum laju inflasi Provinsi Gorontalo mengikuti perkembangan nasional dan selama tiga tahun terakhir ini berada di bawah 10%. Pada tahun 2010

inflasi Provinsi Gorontalo mencapai 7,43% dan tahun 2011 mencapai 4,08%. Pada tahun 2012 sampai bulan April inflasi mencapai 1,33%. Komponen yang berpengaruh terhadap inflasi di Provinsi Gorontalo adalah kelompok pengeluaran sektor kesehatan, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau serta bahan makanan

- **Perkembangan PAD,**
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah". Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pada tahun 2010 jumlah PAD Provinsi Gorontalo mencapai 133,4 milyar rupiah dan tahun 2011 naik menjadi 154,5 milyar rupiah. Kontribusi dari PAD Provinsi Gorontalo 90,5% berasal dari pajak daerah.
- **Pertumbuhan Ekspor,**
Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses ekspor pada umumnya adalah tindakan untuk mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri untuk memasukannya ke negara lain. Ekspor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima.
- **Pertumbuhan Impor,**
Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

6. RPJMD Provinsi Gorontalo 2007-2012 tidak secara spesifik menyebutkan tentang prioritas pembangunan sebagaimana yang dijabarkan dalam RPJMN 2010-2014, meskipun demikian implementasi prioritas nasional terjabarkan dalam agenda utama, program kerja SKPD dan program kerja lintas SKPD, sedangkan RPJMD Provinsi Gorontalo 2012-2017 memiliki relevansi yang lebih nyata dengan RPJMN, dimana prioritas program nasional terjabarkan dalam tujuan pembangunan lima tahun ke depan.
7. Secara tersirat visi dan misi RPJMD 2007-2012 dan RPJMD 2012-2017 memiliki relevansi karena keduanya bermakna peningkatan kemakmuran masyarakat Provinsi Gorontalo sebagaimana visi pembangunan nasional.
8. Relevansi antara arah pembangunan yang terdapat dalam RPJPD 2009-2025 dengan arah kebijakan dalam RPJMD 2012-2017 adalah arah pembangunan dalam RPJMD, pelaksanaannya harus mengacu pada arah pembangunan dalam RPJPD.
9. RPJMD Provinsi Gorontalo telah memuat dan memperhatikan Koridor Ekonomi Sulawesi sebagaimana yang telah disebut dalam MP3EI 2011-2025.
10. Pada umumnya indikator prioritas nasional di Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan, sehingga Kinerja pembangunan daerah Provinsi Gorontalo adalah baik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengingat siklus RPJMD Provinsi Gorontalo memiliki periode waktu yang berbeda dengan RPJMN maka hendaknya yang dijadikan patokan dalam penyusunan dokumen ini adalah dokumen jangka panjang daerah dan nasional yaitu RPJPD 2007-2025 dan RPJPN 2005-2025.
2. Perencanaan merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah, oleh karena itu dokumen ini harus memiliki relevansi mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
3. Titik berat perencanaan ekonomi Provinsi Gorontalo hendaknya memperhatikan arahan dalam koridor ekonomi sebagaimana yang diamanatkan dalam Masterplan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Provinsi Gorontalo. 2009. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2007-2025
- . 2007. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2007-2012
- . 2012. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017
- Bappenas. 2009. Panduan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2009. Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah. Jakarta
- . 2010. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014
- dan Universitas Negeri Gorontalo. Laporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2009, 2010 dan 2011
- Bernardin, John H. & Russel, Joyce F.A. 1993. *Human Resources an experiential approach*. Singapura: McGraw-Hill, Inc.
- Bryson, John M. 1995. *Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement (Rev. ed.)*. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers.
- Dwiyanto, Agus. 1995. *Penilaian Kinerja Organisasi Publik. Makalah dalam seminar sehari: Kinerja Organisasi Sektor Publik, Kebijakan dan Penerapannya*. Fispol UGM, Yogyakarta.
- Jackson, J.H. Morgan, CP, dan Paolillo, J. 1978. *Organization Theory, A Macro Perspective for Management*, Prentice-Hall, USA.
- Kamus Illustrated Oxford Dictionary (1998)
- Keban, Yermias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori Dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media
- Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi. 2011. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
- Pollitt, Christopher & Geert Boukaert, 2000. *Public Management Reform. Oxford:University Press*.
- Steers, Richard M. 1985. *Eefektivitas Organisasi*. Penerbit Erlangga, Jakarta.